

REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 01 Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19720303 200604 1 020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan.....	15
Tabel 2.2.2. Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan	15
Tabel 2.2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan	16
Tabel 2.2.4. Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan	16
Tabel 2.2.5. Aset/Modal	17
Tabel 2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang LH	20
Tabel 2.3.2. Sungai yang Dipantau Tahun 2020.....	26
Tabel 2.3.3. Luas Kawasan Hutan.....	28
Tabel 2.3.4. Luar Kawasan Penggunaan Lainnya.....	28
Tabel 2.3.5. Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2020.....	29
Tabel 2.3.6. Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2020.....	30
Tabel 2.3.7. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2020	30
Tabel 2.3.8. Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair.....	33
Tabel 2.3.9. Data Limbah B3 Tahun 2020	33
Tabel 2.3.10. Usaha/Kegiatan mempunyai Izin Limbah B3.....	34
Tabel 2.3.11. Rekomendasi Lingkungan Tahun 2016 s/d 2020.....	36
Tabel 2.3.12. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/ Kegiatan Kabupaten kepulauan Selayar	37
Tabel 2.3.13. Usaha/Kegiatan yang Diawasi Tahun 2020.....	37
Tabel 2.3.14. Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2020.....	39
Tabel 2.3.15. Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan Kab. Kep. Selayar Tahun 2016- Tahun 2020.....	41
Tabel 2.3.16. Timbulan Sampah Masyarakat.....	44
Tabel 2.3.17. Pengurangan Sampah dari Sumbernya.....	45
Tabel 2.3.18. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK.....	47
Tabel 2.3.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	52
Tabel 3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH	59
Tabel 3.2.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar.....	63
Tabel 3.3.1. Permasalahan Pelayanan DLH berdasarkan Sasaran Renstra KLH berserta Faktor Pendorong Dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya ...	65
Tabel 3.3.2. Permasalahan Pelayanan DLH berdasarkan Sasaran Renstra DPLH berserta Faktor Pendorong Dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya ...	67
Tabel 3.4.1. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahaan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	78
Tabel 3.5.1. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	83
Tabel 3.5.2. Nilai Skala Kriteria	84
Tabel 4.1.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan Resntra DLH Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan)	87
Tabel 4.1.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan Resntra DLH Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Setelah Perubahan)	87
Tabel 4.2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Sebelum Perubahan)	88

Tabel 4.2.2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Kab Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Setelah Perubahan)	88
Tabel 4.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH (Sebelum Perubahan).....	90
Tabel 4.2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH (Setelah Perubahan)	91
Tabel 5.1.1. Analisis Swot.....	93
Tabel 5.2.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra DLH.....	95
Tabel 6.3.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	105
Tabel 7.1. Indikator Kinerja DLH.....	125
Tabel 7.2. Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi	14
Gambar 2.3.1. Grafik Perkembangan IKLH	21
Gambar 2.3.2. Grafik Perkembangan IKA	22
Gambar 2.3.3. Grafik Perkembangan IKU	23
Gambar 2.3.4. Grafik Perkembangan IKTL	24

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DLH.....	10
2.1. TUGAS, FUNGSI,DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
2.2. SUMBER DAYA.....	15
2.3. KINERJA PELAYANAN	17
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	55
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLH	57
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	57
3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	60
3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI	64
3.4. TELAHAH RTRW DAN KLHS RPJMD	69
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	81
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	85
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH.....	86
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH	88
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	92
5.1. STRATEGI	92
5.2. ARAH KEBIJAKAN.....	93
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	99
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	99
6.2. KELOMPOK SASARAN	104
6.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	104
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	170
BABVIII: PENUTUP	175
LAMPIRAN.....	176

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar harus mencakup seluruh aspek lingkungan yang merefleksikan kebutuhan spesifik Kepulauan Selayar dengan tetap mengacu pada nilai-nilai serta arah kebijakan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Dengan berlakunya UU No 25 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap OPD harus menyusun Renstra yang mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra DPLH Provinsi, dan dokumen terkait lainnya.

Di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tercantum sasaran jangka menengah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim, sementara itu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran dalam Renstra adalah meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacu pada RPJMD 2021-2026 adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif, dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan – perubahan lingkungan eksterna maupun internal dan

bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan serta target indikatif kinerja harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsi baik untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan yang mengacu pada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah Sistem Perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Selayar Tahun 2013-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar , Tahun 2012 Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
- b. untuk sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu Tahun 2021-2026;
- b. untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- d. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- e. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian latar belakang wajibnya disusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta garis besar sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, yang dilengkapi dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup untuk pencapaian visi dan Misi yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan yang dipilih beserta perencanaan pendanaan dari setiap program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan kelompok sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra tersebut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk itu, tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
 - a. Tugas Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Fungsi Kepala Dinas adalah:
 - a) Perumusan Kebijakan urusan pemerintahanbidang Lingkungan Hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sekretaris Dinas
 - a. Tugas Sekretari Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur lingkup Dinas.
 - b. Fungsi Sekretaris Dinas adalah:

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b) Pengkoordinasian penyusunan program, pelaporan, dan hukum;
 - c) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- a. Tugas Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Fungsi Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas
- a. Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas adalah membantu Kepala Dinas dalam

mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas.

b. Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah:
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

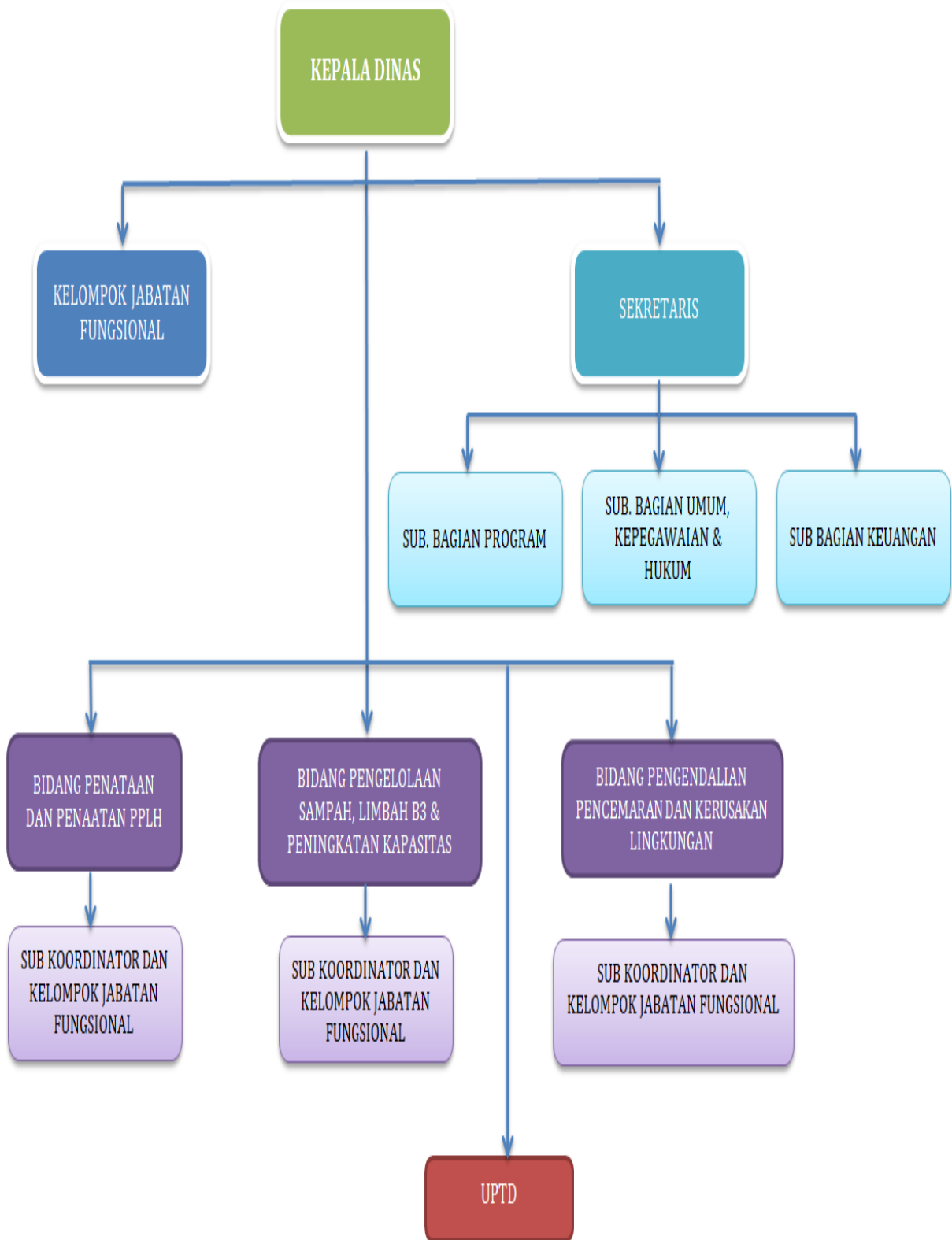
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peningkatan Kapasitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai 321 orang yang terdiri dari 39 Orang PNS dan 282 Orang Non PNS, dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.1. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
IV	4	9	13
III	1	3	4
II	1	0	1
I	0	0	0
Kontrak Bupati	135	160	295
Sukarela	0	0	0
Jumlah	141	172	321

Sumber : Bagian Kepegawaian DLH Tahun 2022

Tabel 2.2.2. Klasifikasi PNS menurut Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
EselonII/B	1	0	1
EselonIII/A	1	0	1
EselonIII/B	0	3	3
EselonIV/A	3	9	12
Fungsional	0	0	0
Analisis SDM Aparatur	0	1	1
Analisis Hukum	0	1	1
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	0	1
Pramu Bakti	1	0	1
Bendahara	1	0	1
Pengadministrasi Penerimaan	1	0	1
Pengadministrasi Keuangan	0	1	1
Analisis Lingkungan Hidup	0	2	2
Pengawas Lingkungan Hidup	1	0	1
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	1	1	2
Pengadministrasi Umum	5	0	5
Jumlah	16	18	34

Sumber : Bagian Kepegawaian DLH Tahun 2022

Tabel 2.2.3. Klasifikasi PNS menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	1	3	4
STRATA 1	7	13	20
DIPLOMA 4	0	0	0
DIPLOMA 3	0	1	1
DIPLOMA 2	0	0	0
DIPLOMA 1	0	1	1
SLTA	7	0	7
SLTP	0	0	0
SD	1	0	1
Jumlah	16	18	34

Sumber : Bagian Kepegawaian DLH Tahun 2022

Tabel 2.2.4. Klasifikasi Non PNS menurut Jabatan

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Petugas Administrasi	9	19	28
Sopir Mobil Sampah	13	0	11
Sopir Motor Sampah	23	0	22
Operator ONLIMO	1	0	1
Petugas Oprs. TPA	3	9	12
Petugas Cek Point TPA	0	2	2
Koordinator Bank Sampah	1	0	1
Petugas Oprs. Bank Sampah	9	11	20
Petugas Administrasi Bank Sampah	0	3	3
Operator Alat Berat	2	0	2
Co. Operator Alat Berat	1	0	1
Penagih Retribusi	0	19	19
Penyapu Jalan	38	72	110
Pembersih Drainase	21	0	21
Karnek	39	0	39
Jumlah	135	160	282

Sumber : Bagian Kepegawaian DLH Tahun 2022

b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.5. Asset/Modal

Nama Barang	Harga Perolehan
a. Taman Hijau	199.441.000,-
b. Kendaraan Roda Empat	448.233.000,-
c. Kendaraan Roda Tiga	28.406.000,-
d. Kendaraan Roda Dua	155.400.000,-
e. Alat Bengkel dan Ukur	112.065.000,-
f. Alat Pertanian/Peternakan/Perikanan	4.872.478,-
g. Alat Kantor dan Rumah Tangga	260.912.650,-
h. Alat Studio dan Komunikasi	20.800.000,-
i. Alat Laboratorium	1.268.291.130,-
j. Bangunan Gedung	456.866.000,-
k. Bangunan Monumen Adipura	125.000.000,-
l. Bangunan Air/Irigasi	1.609.171.000,-
m. Buku dan Perpustakaan	340.031.800,-

c. Unit usaha

Dinas Lingkungan Hidup memiliki Unit Usaha yang dikelola, yaitu Bank Sampah dan Retribusi Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu komponen dari Dinas Lingkungan Hidup yang Sejak tahun 2021 berkomitmen untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian pendapatan dari Retribusi Sampah yang selama ini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, maka Indikator urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota;
2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota;
3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten;
4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air;
5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara;
6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan;
7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
8. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota;
9. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA;
10. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;
11. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;
12. Penetapan hak MHA;
13. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
14. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana;
15. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;
16. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
17. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.;
18. Timbulan sampah yang ditangani;
19. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;
20. Persentase cakupan area pelayanan;
21. Persentase jumlah sampah yang tertangani;
22. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota;
23. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan;
24. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota;
2. Indeks kualitas air (IKA);
3. Indeks Kualitas Udara (IKU);
4. Indeks tutupan hutan (ITH);
5. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota;
6. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota;
7. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota;
8. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
9. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
10. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota;
11. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH;
12. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat;
13. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.

Selanjutnya urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Tabel.2.3.1.**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

NO	SUB URUSAN	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3.
		b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
		a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

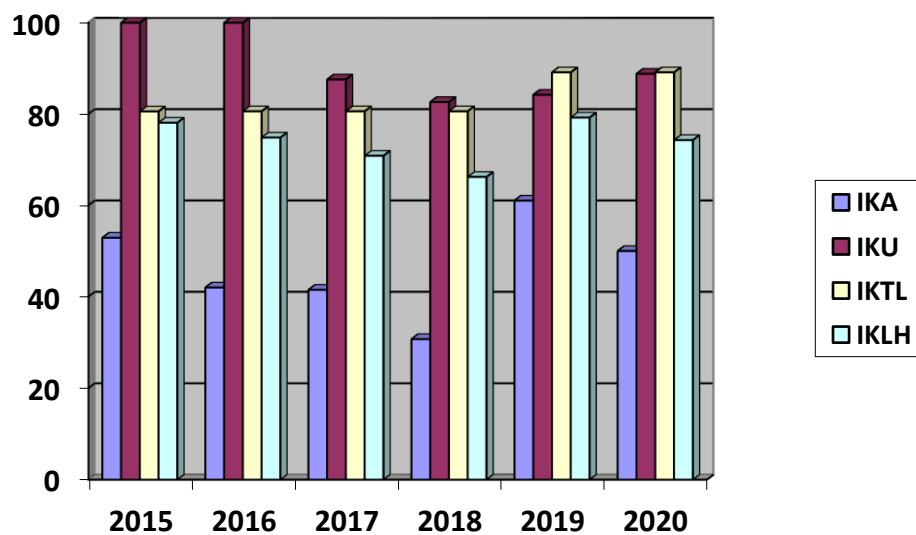
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah.
		b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
		C Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sedangkan hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2015-2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.3.1
Perkembangan IKLH
Tahun 2015 s/d Tahun 2020**



Keterangan:

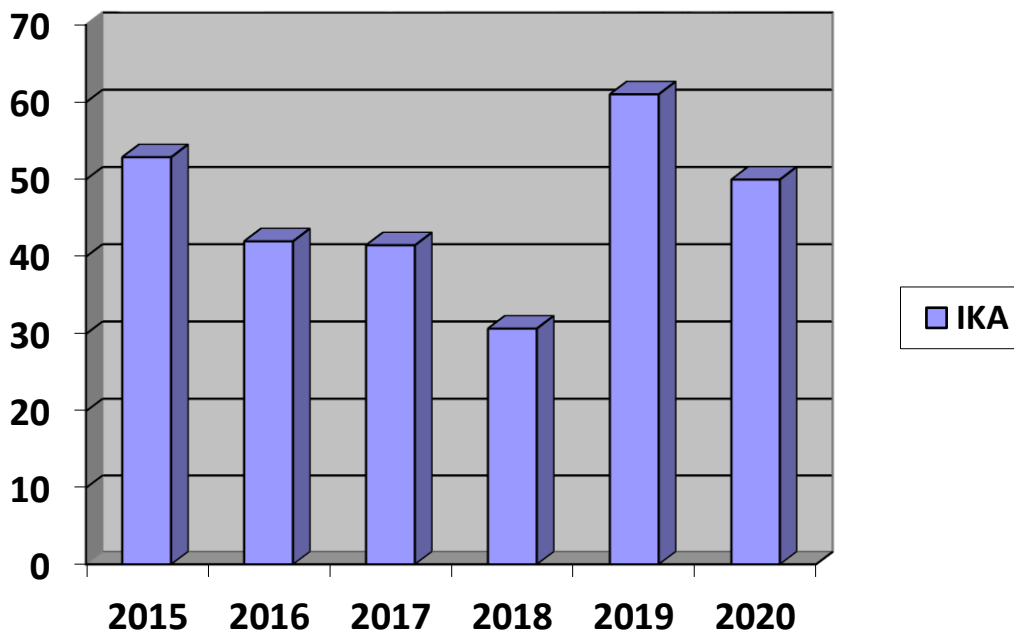
Nilai IKLH	Predikat
> 80	Sangat Baik
70,01– 80	Baik
60,01 – 70	Cukup Baik
50,01 – 60	Kurang Baik
40,01 – 50	Sangat Kurang Baik
< 40,01	Waspada

Pada gambar 2 di atas, tampak bahwa capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami penurunan dan hanya tahun 2019 yang mengalami peningkatan. Kemudian pada Tahun 2020 IKLH mengalami penurunan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan belum mencapai maksimal dan cenderung melemah. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

b. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3.2
Grafik Perkembangan IKA
Tahun 2015 s/d Tahun 2020



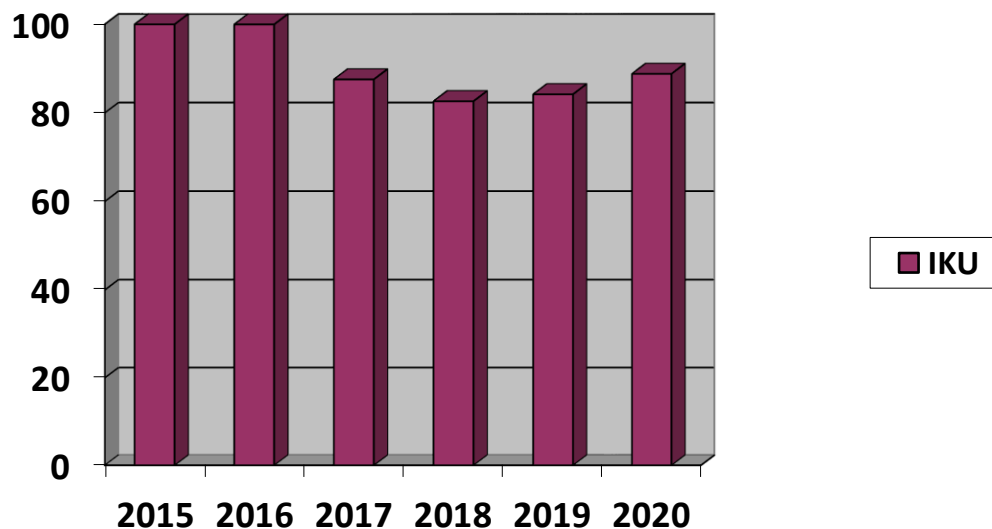
Keterangan :	Nilai IKA	Predikat
	> 70,01	Sangat Baik
	60,01 – 70	Baik
	50,01 – 60.....	Cukup Baik
	40,01 – 50.....	Kurang Baik
	30,01 – 40.....	Sangat Kurang Baik
	< 30,01	Waspada

Pada gambar 3 di atas, tampak bahwa capaian IKA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami penurunan dan hanya tahun 2019 yang mengalami peningkatan. Kemudian pada Tahun 2020 IKA mengalami penurunan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan belum mencapai maksimal dan cenderung melemah. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar pencemar terhadap partikel (PM10, PM25) dan oksidan/ozon (O3) dalam udara. Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3.3
Grafik Perkembangan IKU
Tahun 2015 s/d Tahun 2020



Keterangan :	Nilai IKU	Predikat
	>90,00.....	Sangat Baik
	70,01 – 90,00.....	Baik
	50,00 – 70,00.....	Cukup Baik
	30,00 – 49,99.....	Kurang Baik
	< 30,00	Sangat Kurang Baik

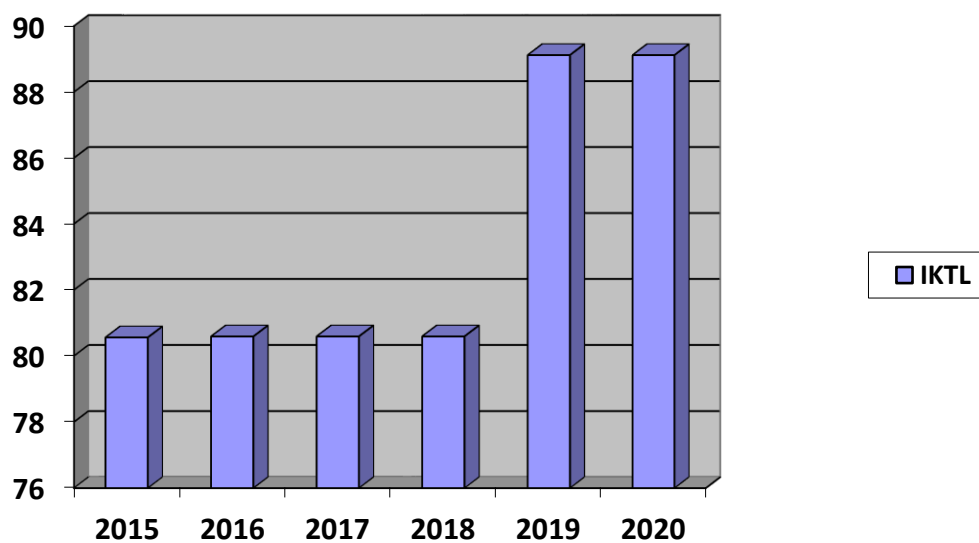
Pada gambar 4 di atas, tampak bahwa capaian IKU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami penurunan dan hanya tahun 2019 dan tahun 2020 yang mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan belum mencapai maksimal. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap ketersediaan aspek penghijauan, aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial.

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3.4
Grafik Perkembangan IKTL
Tahun 2015 s/d Tahun 2020



Keterangan :	Nilai IKTL	Predikat
	> 80,01	Sangat Baik

70,01 – 80.....	Baik
60,01 – 70.....	Cukup Baik
50,01 – 60.....	Kurang Baik
40,01 – 50.....	Sangat Kurang Baik
< 40,01	Waspada

Pada gambar 5 di atas, tampak bahwa capaian IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan telah mencapai target yang direncanakan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu upaya mempertahankan pengelolaan keanekaragaman hayati.

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi lingkungan hidup. Untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 serta RPPLH Kabupaten/Kota.

Tujuan Utamanya adalah untuk menilai, menentukan permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, namun belum dilakukan penjaminan mutu dan validasi yang direncanakan pada awal Tahun 2021. Demikian juga, kegiatan penyusunan RPPLH belum dapat dilakukan karena adanya pemotongan anggaran untuk percepatan penanganan covid-19.

f. Persentase Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Pencemaran Status Mutu Air 2020 sebesar 2,59 berdasarkan pada 14 (empat belas) sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipantau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Sungai yang di Pantau Tahun 2020

No.	Nama Sungai	Nilai PI	Status
1	Hulu Sungai Tabang	5,34	Cemar sedang
2	Hilir Sungai Tabang	4,29	Cemar ringan
3	Sungai Tulang	2,23	Cemar ringan
4	Hulu Sungai Teko	1,11	Cemar ringan
5	Hilir Sungai Teko	3,53	Cemar ringan
6	Hulu Sungai Bitombang	2,06	Cemar ringan
7	Hilir Sungai Bitombang	2,48	Cemar ringan
8	Hulu Sungai Bitombang	1,23	Cemar ringan
9	Hilir Sungai Bitombang	2,60	Cemar ringan
10	Hilir Sungai Teko	2,24	Cemar ringan
11	Sungai Tulang	4,13	Cemar ringan
12	Hulu Sungai Tabang	2,26	Cemar ringan
13	Hilir Sungai Tabang	2,35	Cemar ringan
14	Hulu Sungai Teko	0,36	Memenuhi Baku Mutu
Kualitas Air Rata-rata		2,59	Cemar Ringan
Nilai IPA		36,21	

Berdasarkan 14 (empat belas) sampel yang telah dianalisis dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup disimpulkan bahwa sungai yang dipantau masih dalam kondisi cemar ringan. Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan

Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait, serta Dinas terkait lainnya dari Pemerintah Daerah serta pelaku usaha. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, telah dilakukan pemantauan kualitas air laut dan kualitas air sumur dengan hasil uji laboratorium.

Keberadaan lahan kritis merupakan salah satu penyebab kurangnya ketersediaan air tanah karena menurunnya kualitas air. Lahan kritis yang semakin luas akan mengancam kehidupan, baik yang ada di darat maupun yang ada di perairan. Oleh karena itu kegiatan remediasi, rehabilitasi dan restorasi lahan kritis sangat dibutuhkan. Sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya alam dapat dikembangkan dan dilestarikan untuk mengembalikan fungsi lahan secara optimal sehingga berguna bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penanganan kondisi lahan kritis yang berbeda-beda melalui kegiatan remediasi, rehabilitasi dan restorasi memerlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang menangani lahan kritis merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup.

g. Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Keberadaan hutan di Kepulauan Selayar meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Dimana pengelolaannya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan selebihnya adalah hutan hak. Keberadaan Hutan lindung (*protection forest*) maupun hutan produksi terbatas yang ada saat ini, pengelolaannya telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun operasionalisasinya berada dalam koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Selayar. Untuk lebih jelasnya luas hutan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.3.3.
Luas Kawasan Hutan

Kecamatan	Hutan Mangrove Sekunder (Ha)	Hutan Primer (Ha)	Hutan Sekunder (Ha)
Benteng	0	0	190,31
Bontoharu	95,84	0	8.107,83
Bontomanai	0	0	10.986,01
Bontomatene	0	0	11.166,37
Bontosikuyu	0,88	38,03	16.141,74
Buki	0	0	3.695,48
Pasilambena	33,26	140,14	5.610,20
Pasimarannu	0	10.392,45	2.005,90
Pasimasunggu	57,54	0	8.783,68
Pasimasunggu Timur	125,27	0	3.107,41
Takabonerate	0	5,30	528,86
Total	312,79	10.575,92	70.323,79

Untuk lebih jelasnya, luas kawasan penggunaan lainnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.4 :
Luas Kawasan Penggunaan Lainnya

Kecamatan	Lahan Terbuka	Pemukiman	Perkebunan	Rawa	Savana	Sawah	Semak Belukar	Tambak
Benteng	11,64	289,65	0	0	0	4,09	0	0
Bontoharu	14,69	191,05	1.438,83	0	0	2.593,75	47,51	267,36
Bontomanai	0	254,23	438,39	0	0	1.061,49	0	0
Bontomatene	10,78	327,86	0	0	0	3.960,56	262,78	0
Bontosikuyu	975,99	220,28	1.815,99	7,94	0	862,18	851,44	133,85
Buki		149,55	0	0	0	2.991,42	0	0
Pasilambena	254,05	62,18	2.944,85	0	0	1.205,61	13,61	0
Pasimarannu	120,07	61,21	4.195,27	1,01	121,16	488,06	0	0
Pasimasunggu	740,63	114,26	481,32	78,89	0	1.407,63	443,39	65,36
Pasimasunggu Timur	13,51	90,32	23,14	0	0	1.738,33	0	316,75
Takabonerate	420,87	97,20	1.285,70	0	0	0	231,06	1,34
Total	2.562,23	1.857,79	12.623,49	87,84	121,16	16.313,12	1.849,79	784,66

Upaya Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu

Kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimarannu dan Kecamatan Pasimasunggu. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman. Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan penghijauan sebanyak 11 jenis bibit yaitu mangga, sukun, bakau, pucuk merah, glodogan tiang, jati super, pala, cengkeh, durian, rambutan dan ketapang kencana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, menurut Pasal 29 (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Pasal 29 (3) Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah Kota paling sedikit 20% dari luas wilayah Kota. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau juga mewajibkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah Kepulauan Selayar. Penambahan luas ruang terbuka hijau dapat ditingkatkan melalui penanaman pohon berbuah di lahan privat/masyarakat dan penanaman pohon jenis bunga/kembang di lahan publik. Penambahan RTH Privat dan RTH Publik Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.5
Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2020**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)							Ha
	Durian	Rambutan	Mangga	Pala	Cengkeh	Jati Super	Sukun	
Benteng	3,200	3,000	750	400	-	3,000	500	19.89
Bontoharu	1,320	2,800	3,925	1,000	2,800	4,500	2,000	44.69
Bontomanai	2,050	-	-	3,800	4,000	1,700	2,550	36.64
Bontomatene	200	-	-	300	250	-	-	1.63
Buki	200	-	-	3,200	250	1,500	-	9.60
Bontosikuyu	1,380	300	1,200	5,850	5,700	4,066	2,028	47.09
Pasimasunggu Timur	-	-	400	-	-	-	500	4.48
Pasimasunggu	-	-	3,000	4,337	-	-	3,000	40.38
Pasimarannu	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasilambena	840	-	-	2,300	-	2,220	-	8.30
Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Luas Penambahan RTH Privat	9,190	6,100	9,275	21,187	13,000	16,986	10,578	212.70

Tabel 2.3.6
Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)					Ha
	Bakau	Pucuk Merah	Ketapag Kencana	Glodogan Tiang	Tabebuaya	
Benteng	-	880	215	310	473	2.05
Bontoharu	-	1,125	70	250	33	1.18
Bontomanai	-	980	600	100	306	2.45
Bontomatene	-	650	505	-	100	1.61
Buki	-	900	95	-	-	0.89
Bontosikuyu	-	620	560	-	-	1.50
Pasimasunggu Timur	2,700	70	100	-	-	0.30
Pasimasunggu	2,800	50	-	700	-	0.36
Pasimarannu	-	-	-	350	-	0.13
Pasilambena	-	-	-	-	-	-
Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-
Total Luas Penambahan RTH Publik	5,500	5,275	2,145	1,710	912	10.47

Tahun 2020, luas RTH Publik sebesar 1.868,98 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.663 Ha atau sebanyak 1,377%. Untuk lebih rinci, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.7
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	% RTH Publik	Ket.
	Km2	Ha			
Benteng	24,63	2.463	52,25	2,121	
Bontoharu	128,21	12.812	41,22	0,321	
Bontomanai	136,42	13.642	432,96	3,173	Bontomanai
Bontomatene	193,05	19.305	26,00	0,134	Bontomatene
Buki	67,74	6.774	1.116,66	16,484	Buki
Bontosikuyu	248,22	24.822	61,50	0,247	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,30	0,451	Pasimasunggu Timur
Pasimasunggu	131,8	13.180	35,36	0,268	Pasimasunggu
Pasimarannu	195,33	19.533	40,13	0,205	Pasimarannu
Pasilambena	114,88	11.488	30,00	0,261	Pasilambena
Taka Bonerate	49,3	4.930	2,60	0,053	Taka Bonerate
Total RTH Publik		135.663	1.868,8	1,377	Total RTH Publik

Adapun Ruang Terbuka Hijau yang ada dalam Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

- a. Taman Kota Bunga sebanyak 5 lokasi yaitu :
 - 1) Appabatu seluas 386 m²;
 - 2) Terumbu Karang seluas 138 m²;
 - 3) Taman Kota seluas 817 m²;
 - 4) Edelweis seluas 45,84 m²;
 - 5) Simpedes seluas 41,18 m²;
 - 6) Taman Pelangi seluas 5.000 m².
- b. Taman Kehati seluas 4.192 m².
- c. Pemakaman sebanyak 2 lokasi yaitu :
 - 1) Lango-Lango Baru seluas 7.149 m²;
 - 2) Bonea seluas 20.000 m².
- d. Jalur Hijau dengan luas 23.297,63 m².
- e. Terminal Bonea dengan luas 10.000 m².
- f. Sempadan Sungai sebanyak 3 lokasi yaitu :
 - 1) Sungai Parappa seluas 42.000 m²;
 - 2) Sungai Bua-Bua seluas 30.000 m²;
 - 3) Sungai Appabatu seluas 42.000 m².
- g. Sempadan Pantai seluas 15.000 m².
- h. Lapangan Pemuda seluas 10.000 m².
- i. Pekarangan Perkantoran seluas 70.935 m².
- j. Pasar seluas 20.000 m².
- k. Hutan Kota sebanyak 4 lokasi yaitu :
 - 1) Tepok seluas 110.000 m²;
 - 2) Bonea seluas 6.000 m²;
 - 3) Bahona Bonea seluas 80.000 m²;
 - 4) Belakang Pemda seluas 10.000 m².

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman yang menangani Taman Kota dan Pemakaman, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani Taman

Kehati dan Jalur Hijau. Kegiatan yang dilakukan untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yaitu pemeliharaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, perencanaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati, serta pengadaan bibit yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air juga dilaksanakan dengan 1 lokasi pelaksanaan yaitu sekitar aliran sungai Je'ne lopi Desa Kalepadang yang merupakan alur dari sungai Giring-giring ke Kelurahan Bontobangun.

h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Selain itu, masih ada 1 unit Rumah Sakit Rujukan dan 2 unit Puskesmas yang belum beroperasi. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebanyak 33,33 kg/hari atau sekitar 1 ton (1000 kg)/bulan. Hasil uji laboratorium terhadap limbah cair terdapat parameter yang melewati baku mutu yaitu temperatur air, pH dan COD HR di Puskesmas Benteng; Zat Tersuspensi/TSS dan COD HR di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung, pH, COD HR di TPA Kaburu. Hal ini menandakan bahwa filterisasi dari IPAL yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.8
Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair

Lokasi	Parameter						
	Temperatur	TSS	TDS	pH	DHL	COD	Amonia
Lindi TPA Kaburu	32,2	61	3640	9,78	4860	690	-0,08
IPAL Puskesmas Benteng	31,2	20	774	9,24	1120	302	-0,11
IPAL RSUD Hayyung	29,1	95	499	7,89	728	320	-0,17

Sampai saat ini belum ada alat transportasi dan pengelola limbah medis (incinerator) di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pengangkutan limbah medis difasilitasi oleh pihak ke tiga melalui penandatanganan MOU antara pihak fasyankes dengan pihak ketiga. Selain itu, penghasil limbah B3 lainnya adalah PLTD, usaha perbengkelan, UMKM dan sektor pariwisata. Namun LB3 yang dihasilkan masih dalam jumlah yang sangat kecil yaitu limbah cair sebanyak 5.499,6 M3 dan limbah padat sebanyak 6.808,7 Kg. Untuk lebih rinci, data limbah B3 yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.9
Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair

Nama Fasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M3)	Perlakuan	Infeksius	Perlakuan	Benda Tajam	Perlakuan	Farmasi	Perlakuan
UPT Puskesmas Barugaiya	15,5	SPAL	165	TPS	22	TPS	85,5	TPS
UPT Puskesmas Polebungin	12,5	SPAL	190	TPS	15	TPS	135	TPS
UPT Puskesmas Buki	19,5	SPAL	155	TPS	16	TPS	0	-
UPT Puskesmas Bontomatene	39,63	SPAL	188,24	TPS	29,57	TPS	26,9	-
UPT Puskesmas Parangia	11	SPAL	110	TPS	12	TPS	26	TPS
UPT Puskesmas Bontosunggu	14	SPAL	240	TPS	0	TPS	24	TPS

UPT Puskesmas Bontosikuyu	25	SPAL	17	TPS	19	TPS	0	-
UPT Puskesmas Lowa	22	SPAL	225	TPS	125	TPS	92	TPS
UPT Puskesmas Benteng	20,5	SPAL	310	TPS	198	TPS	33	TPS
RSUD KH. Hayyung	5320	SPAL	3898	TPS	496	TPS	176	TPS
TOTAL	5499,6		5498,2		932,6		377,9	

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.10
Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3

NO	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomor Izin
1	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020
4	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan Beracun	Nomor 56/II/Tahun 2018, tanggal 1 Februari 2018
5	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 adalah belum adanya kegiatan pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara LB3 ke Tempat Pengolahan limbah B3, sehingga untuk usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 seperti oli bekas, kain majun, dan jenis LB3 lainnya, hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan permrosesan selanjutnya.

i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Layanan rekomendasi lingkungan diberikan kepada masyarakat dunia usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah rekomendasi lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak 173 buah.

Perbandingan Rekomendasi Lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.11
Rekomendasi Lingkungan Tahun 2016 s/d 2020

No.	Tahun	Jumlah Rekomendasi Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH	
1	2016	439	2	-	-	2
2	2017	114	11	-	-	7
3	2018	75	5	-	-	5
4	2019	297	11	-	-	10
5	2020	161	11	1	-	11

Sumber : DLHK Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pelayanan rekomendasi lingkungan, seperti SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi lingkungan, baik yang diterbitkan oleh Kabupaten (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) maupun yang diterbitkan oleh Provinsi (DELH dan DPLH). Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan diawasi terus, walaupun belum terjangkau secara keseluruhan. Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.12
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau
Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang Taat	22	45	33	9	7
2.	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Diawasi	22	45	33	21	11
3.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	100	100	100	42,86	63,64

Sumber : DLHK Tahun 2020

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2020 sebanyak 11 buah dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 7 buah, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 1 buah dan 3 buah usaha/kegiatan yang telah dihentikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.13 :
Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2020

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Lokasi	Pemilik	Fakta dan temuan lapangan	Analisis Yuridis /Ketaatan
1.	Pembangunan Halona Water Boom	Barugaiya Kec. Bontomanai		Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin Lingkungan	Taat
2.	Perataan Lahan Lokasi Perumahan	Jl. KH. Abd. Kadir Kasim Kec. Benteng	Rafik	Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL	Taat

3.	Penambangan Pasir Pantai	Sumingi Desa Barugaiya	Hasanudin Khaer	Kegiatan penambangan pasir pantai padahal di dokumen lingkungan SPPL adalah kegiatan normalisasi sungai	Telah dihentikan
4.	Penambangan Tanah Urug/Batuan	Jl. Poros Tana Bau Baera Desa Bontotangnga		Belum memiliki izin lingkungan.	Belum Taat
5.	Penambangan Tanah Urug/Batuan	Jl. Poros Kantor Bupati-Kadieng Saga Kel. Putabangun		Suda memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan izin lingkungan	Taat
6.	Penambangan Batu Gunung	Dusun Gojang Desa Bontomarannu	PT. Marga Jampea	Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan izin lingkungan	Taat
7.	Penambangan Pasir Pantai	Desa Mekar Indah dan Desa Buki		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki dokumen lingkungan • Menimbulkan abrasi dan perubahan garis pantai 	Sudah dihentikan
8.	Pengambilan Pasir Pantai	Desa Bungaiya	Penduduk Asli	Menimbulkan perubahan garis pantai	Sudah dihentikan
9.	Pembangunan Industri Minyak Atsiri, Bumbu Penyedap dan Bumbu Masak	Dusun Kassa Bumbung Desa Bungaiya	PT. Tripper Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan • Kegiatan masih tahap pembangunan sarana prasarana 	Taat
10.	PLTD Pulau Pasi	Manarai Desa Bontoborusu		<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki dokumen Lingkungan berupa SPPL • Telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik 	Taat

11.	Kawasan Wisata Pantai Tamamelong	Tamamelong Desa Patikarya		Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Taat
-----	----------------------------------	------------------------------	--	---	------

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan utamanya AMDAL dan UKL-UPL terkendala karena belum adanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup, sehingga kalau terjadi kasus lingkungan, masih dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kelompok masyarakat yang juga berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kelompok Pengelola dan Pemakai Air, serta SAKA

KALPATARU atau Lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan perhatian untuk memberikan bantuan, baik berupa material maupun berupa non material.

Selanjutnya, pemerintah juga sedang menggalakkan program sekolah adiwiyata. Pembinaan sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.14 :
Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2020**

No.	Nama Mitra LH	Kondisi	Alamat	Ket
1.	SMKN 1	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Kec. Benteng	
2.	SMAN 1	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Kec. Benteng	
3.	SMPN 1	Lingkungan hijau dan bersih	Kec. Benteng	
4.	SMPN 2	Tahap kelengkapan data	Kec. Bontomatene	Sertifikat Kabupaten

5.	SMPN 3	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Pariangan Kec Bontosikuyu	-
6.	SMPN 4	Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program Gerakan peduli LH	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten
7.	SMPN 10	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Tongke- TongkeKec. Bontosikuyu	
8.	SMPN 16	Siap mengikuti Program Sekolah Adiwiyata	Kec. Buki	
9.	SMPN 21	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomatene	-
10.	SMPN 27	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomanai	-
11.	MTSN	Siap mengikuti Program sekolah Adiwiyata	Kec. Buki	Sertifikat Kabupaten
12.	SDI 58	Lingkungan bersih, pengomposan jalan, dan dokumentasi lengkap	Kec. Benteng	
13.	SDI 62	Lingkungan hijau dan bersih	Kec. Benteng	
14.	SDI 67	Lingkungan hijau dan bersih	Biring Balang Kec. Bontosikuyu	
15.	SDI 74	Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program gerakan peduli LH	Pariangan Kec Bontosikuyu	
16.	SDI 88	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomanai	
17.	SDI 112	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Benteng	
18.	SDN 1	Tahap pemeriksaan dokumen	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten dan Provinsi
19.	SDN 9	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Tile-Tile Kec. Bontosikuyu	
20.	SDN Parak Selatan	Lingkungan hijau	Kec. Bontomanai	-
21.	SDN 60	Tahap kelengkapan dokumen	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten
22.	Saka Kalpataru	Tahap pembinaan anggota	Kec. Benteng	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sekolah

yang dibina untuk memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata Tahun 2020 sebanyak 22 buah, namun yang berhasil mendapatkan sertifikat tingkat kabupaten sebanyak 5 buah dan yang lolos memperoleh sertifikat tingkat provinsi hanya 1 buah yaitu SDN I Kepulauan Selayar.

k. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang akseleratif di Kepulauan Selayar, maka pengungkit sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlah penanganan pengaduan/kasus lingkungan yang diterima DLHK sebanyak 1 kasus meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2018, kemudian menurun kembali menjadi 9 kasus pada tahun 2019 dan 10 kasus pada tahun 2020. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada umumnya dapat ditindak lanjuti oleh PEMDA.

Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ditindak lanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan, Identifikasi, Investigasi, serta pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana berdasarkan tingkat pelanggarannya. Persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3.15
Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus
Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengaduan/kasus lingkungan yang Diregistrasi	1	5	27	9	10
2.	Jumlah kasus lingkungan yang divalidasi	1	5	27	9	8
3.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	100	100	100	100	80

Sumber : DLHK Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup tahun 2020 sebanyak 10 buah kasus, namun 2 buah kasus belum ditindaklanjuti akan melakukan verifikasi lapangan diawal Tahun 2021. Pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti adalah penambangan pasir pantai Bansiang di Desa Buki, adanya penumpukan materil di jalan poros Desa Parak, dampak peternakan ayam di Balang Hibung Kolo-Kolo Kelurahan Bontobangun, perataan lahan perumahan di Jalan Abdul Karim Kasim, tambang Galian C yang tidak memiliki izin lingkungan di Jalan Poros Baera Desa Bontotangga, tambang Galian C yang tidak memiliki izin lingkungan di Jalan Poros Kantor Bupati-Kadieng Saga Kelurahan Putabangun, pembuangan limbah cair ke laut hasil olahan tempe di Jalan Metro Benteng, penambangan pasir pantai Desa Bungaiya. Sedangkan pengaduan yang belum ditindaklanjuti adalah penebangan pohon di sungai Bontobangun dan tambang Galian C yang tidak memiliki izin lingkungan di Desa Mekar Indah.

1. Program Pengelolaan Persampahan

Pencapaian kinerja pengurangan sampah akan semakin baik, apabila ditunjukkan dengan semakin tingginya realisasi. Sedangkan pencapaian kinerja penanganan sampah akan semakin baik, jika ditunjukkan dengan semakin rendahnya realisasi. Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020 sebesar 549,31 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 42.180,69 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 1,30 %. Sedangkan Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020 sebesar 5.449,95 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 42.180,69 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 12,92 %.

Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 5.999,26 ton/tahun dengan timbulan sampah 42.180,69 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola Tahun 2020 hanya 14,22 % dan masih banyak volume sampah yang tidak terkelola atau tidak tersentuh dengan prinsip 3R dan bahkan terbuang ke lingkungan sekitar sebesar 36.181,43 ton/tahun atau sebesar 85,78 %. Sedangkan kinerja pengelolaan persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang dimanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang).

Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya. Sampah yang tertangani merupakan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, rumah makan, pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain kemudian dipilah antara sampah yang bisa diolah dengan mendaur ulang serta sampah yang ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Kebutuhan sampah atau produksi sampah atau timbulan sampah berdasarkan standar SK. SNI S-04-1991-03 untuk kota kecil di Indonesia adalah antara 2,50 - 2,75 liter/orang/hari. Sehingga timbulan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebesar 350,9 m³/hari atau 115,56 ton/hari atau 42.180,69 ton/tahun. Adapun sampah yang dikelola

terdiri dari pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) dan penanganan sistem kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.16
Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah				Ket.
		(liter/ hari)	(m ³ / hari)	(Ton/hari)	(Ton/ Tahun)	
(1)	(2)	(3=(2)x2,5)	(4=(3)/ 1000)	(5=(4)* 0,33)	(6=(5)*365)	(7)
Benteng	24.842	62.105,00	62,11	20,49	7.480,55	1.000 Ltr = 1 m ³ 1 m ³ 0,33 ton 1 Tahun = 365 hari
Bontoharu	14.794	36.985,00	36,99	12,21	4.454,84	
Bontomatene	13.702	34.255,00	34,26	11,30	4.126,01	
Bontomanai	14.078	35.195,00	35,20	11,61	4.239,24	
Bontosikuyu	15.762	39.405,00	39,41	13,00	4.746,33	
Buki	6.933	17.332,50	17,33	5,72	2.087,7	
Pasimasunggu	8.977	22.442,50	22,44	7,41	2.703,20	
Pasimarannu	10.804	27.010,00	27,01	8,91	3.253,35	
Taka Bonerate	13.880	34.700,00	34,70	11,45	4.179,62	
Pasilambena	8.268	20.670,00	20,67	6,82	2.489,70	
Pasimasunggu Timur	8.037	20.092,50	20,09	6,63	2.420,14	
Total	140.077	350.192,5	350,19	115,56	42.180,69	

Data Jumlah Penduduk: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu usaha untuk mengurangi sampah yang ada, dilakukan pengelolaan sampah (daur ulang) yang dapat bernilai ekonomi. Pengolahan sampah dengan daur ulang, terdiri dari kompos dan produk daur ulang (souvenir, miniatur kendaraan, gantungan kunci, replika kembang, pot bunga, tas, sandal rumah, keranjang, gantungan pakaian

dalam, gantungan sepatu, gantungan sabun, boneka, tempat pensil, dompet, dan lain-lain) yang dilakukan oleh petugas TPST dan peserta kelompok recycle yang telah terbentuk. Peningkatan partisipasi masyarakat, usaha dan kegiatan dilakukan dengan mengadakan pelatihan produksi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah bekas, pembuatan kompos, dan pengawasan limbah B3 secara periodik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.17 :
Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2020

Mitra Lingkungan	Alamat	Volume (Kg)	Volume (Ton)	Keterangan
BS Tanadoang	Kel. Benteng Utara	45.470	45,47	Plastik/Kertas /Kardus
BS Pujasera	Desa Bungaiya	52.810	52,81	Biji Plastik
P. Muhammad Ilyas	Dusun Patori	24.680	24,68	Biji Plastik
P. Faisal	Jl. Abd. Kadir Kasim	11.100	11,10	Plastik Gelondongan
P.Abd. Rahman	Kel.Benteng Utara	9.860	9,86	Besi
P. Kasuri	Jl.Ahmad Yani	14.800	14,80	Plastik/Besi
P. Edi	Jl.Ahmad Yani	33.200	33,20	Besi
BS. Samaturu	Jl.Siswomiharjo	181.130	181,13	Kardus
Hj. Dg. Tabaji	Jl. Rauf Rahman	23.140	23,14	Kardus
P. Mas Ulil	Jl. Metro	16.280	16,28	Plastik Gelondongan
P. Hadi	Jl. Pahlawan	8.000	8,00	Kardus
Porecy Rosa	Kel. Benteng Utara	3.290	3,29	Daur Ulang /Kompos
P. Andi Najwa Intan	Jl. Piere Tendean	2.800	2,80	Kardus
P. Sanusi	Desa Kaburu	120.000	120,00	Plastik Gelondongan
P. TPA	Desa Kaburu	1.250	1,25	Plastik Gelondongan
P. Mas Narto	Desa Kalepadang	1.500	1,50	Plastik Gelondongan
Total		549.310	549,31	

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Selain itu, wilayah Kepulauan Selayar yang dikelilingi laut menyebabkan banyaknya sampah kiriman setiap musim barat dan musim timur. Sumber daya manusia petugas persampahan juga masih terbatas dan budaya bersih belum menjadi *trend* bagi warga. Capaian kinerja DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020, dituangkan dalam Tabel 2.3.18 :

Tabel 2.3.18
Pencapaian Kinerja Pelayanan
DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penanganan Sampah				9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	11,97	12,89	12,92	0,00	1,00	1,23	1,33	1,33
5	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air				2%	2%	2%	2%	3%	2,00%	4,00%	0,02%	5,00%	0,02%	1,00	2,00	0,01	2,50	0,01
6	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL, termasuk SPPL dan UKL-UPL				12	12	15	8	20	5	25	6,82	30	6,82	0,42	2,08	0,45	3,75	0,34
7	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk				0,53%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	0,53%	13,52%	26,20%	2,77%	2,79%	1,00	22,53	37,43	3,46	3,10
8	Penegakan Hukum Lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air				52,9	53	54	55	55	42,01	41,5	30,71	61,04	50,00	0,79	0,78	0,57	1,11	0,91
10	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara				99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,97	87,55	82,62	84,19	88,80	1,00	0,88	0,83	0,84	0,89
11	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan lahan				70,54	70,6	70,67	70,74	70,74	80,59	80,59	80,59	89,12	89,12	1,14	1,14	1,14	1,26	1,26
12	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.			√	394,22	394,22	N/A	N/A	N/A	401,79	310,98	N/A	N/A	N/A	1,02	0,79	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.			√	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	11,97	12,89	12,92	0	100	123	133	133
17	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			√						20,49	162,03	1331,46	633,01	549,31					
18	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).			√	N/A	37	36	N/A	N/A	N/A	37	36	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
19	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.			√	N/A	(4 Kasus) 100	(27 Buah) 100	(12 Kasus) 100	(3 Kasus) 100	N/A	(5 Kasus) 100	(27 Buah) 100	(9 Kasus) 80	(10 kasus) 100	N/A	125	100	75	333
24	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.			√	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

Secara umum, capaian kinerja pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020 masih rendah. Antara lain ditandai dengan masih tingginya kadar karbon monoksida (CO) yang terkandung dalam udara perkotaan. Hasilnya, kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi oleh NO₂, SO₂ dan CO yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor. Materi lain yang saat ini berada di udara adalah particulate matter (PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan.

Demikian juga tentang kualitas air, berdasarkan parameter COD, di berbagai daerah telah melampaui baku mutu. Limbah domestik menjadi penyumbang terbesar (60-90%) pencemaran air. Limbah dengan kategori deterjen bahkan secara langsung dibuang ke wilayah sungai dan perairan sangat mempengaruhi tingkat kecerahan air di beberapa wilayah pesisir dan laut. Tercemarnya air laut maupun sungai, rusaknya struktur tanah serta meningkatnya pencemaran udara juga diakibatkan oleh semakin bertambahnya volume sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke laut dan sungai serta melakukan pembakaran sampah.

Penanganan sampah yang masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu Kumpul-Angkut-Buang kemudian ditimbun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mengakibatkan semakin banyaknya timbulan sampah yang tidak terkelola yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Terkait Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang belum mencapai target disebabkan karena kurangnya kesadaran Pelaku Usaha dan/kegiatan yang memiliki kewajiban izin Lingkungan atau Izin PPLH dalam kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diakibatkan kurangnya pejabat fungsional PPLH dan rendahnya pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin Lingkungan atau izin PPLH sehingga Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti belum mencapai target.

Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, adanya upaya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. Maka Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan beberapa hal khususnya dalam upaya peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Perbup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Bidang Pengendalian Pencemaran;
2. Perluas Kegiatan/pembinaan untuk limbah;
3. Menerapkan sistem Pertanian/Perkebunan/Perikanan yang ramah lingkungan- Bidang Pengendalian Pencemaran (pupuk organik) koordinasi dengan penyuluh (Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan);
4. Penyediaan sarana dan prasarana sampah;
5. Adanya MOU/CSR dari pelaku Usaha/kegiatan (PLN, Bank, Hotel, Toko, dll);
6. Mengadakan papan informasi larangan pembuangan limbah ke saluran/badan air;
7. Melakukan sosialisasi larangan pembuangan sampah/limbah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun, Menetapkan dan Mengendalikan Pelaksanaan RPPLH secara optimal;
2. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara berkala;
3. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui gerakan kali bersih, gerakan jumpa berlian.
4. Melakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pembuatan lubang biopori,

5. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
6. Melakukan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati melalui gerakan penanaman pohon berbunga dan berbuah;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan melalui fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan/izin PPLH/izin limbah B3/izin pengelolaan sampah;
4. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 1. Melakukan pengelolaan sampah terpadu melalui pembentukan Bank Sampah dan rumah kompos di setiap Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 2. Melakukan pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup;
 3. Harga pembelian sampah oleh Bank Sampah Induk dinaikkan dari harga pembelian para pemulung/mitra/Bank Sampah Unit;
 4. Melakukan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan memasyarakatkan pemakaian pupuk organik.

Selanjutnya anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.19 sebagai berikut:

Tabel 2.3.19
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
ELANJA TIDAK LANGSUNG																	
B. Pegawai	1.725.050.000	2.335.100.000.000	3.372.100.000	3.534.056.000	3.585.200.000	1630.555.000	2.114.866.000	3.209.586.000	3.441.758.000	3.377.444.000	0,95	0,91	0,95	0,97	0,94	1,08	1,07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648.264.500	772.963.940.000	3.563.400.000	3.597.098.600	3.524.371.902	572.170.115	739.794.471	3.299.541.059	3.576.462.600	3.503.394.893	0,88	0,96	0,93	0,99	0,99	4,44	5,12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.125.300	567.574.050.000	638.000.000	1.155.389.000	898.305.000	184.633.300	496.395.760	582.289.209	1.145.070.591	897.326.468	0,92	0,87	0,91	0,99	1,00	3,49	3,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	53.700.000	65.000.000.000	40.000.000	73.878.454		53.594.000	60.829.100	37.909.500	66.388.024		1,00	0,94	0,95	0,90		- 1,00	- 1,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	182.368.200	268.441.750,00	107.000.000	25.400.896	20.000.000	160.274.175	217.135.725	68.885.705	25.400.896	19.750.000	0,88	0,81	0,64	1,00	0,99	- 0,89	- 0,88
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	641.620.000	4.726.090.900,00	2.233.000.000	343.624.878	342.243.000	630.320.000	4.531.895.392	2.110.220.146	335.136.818	342.243.000	0,98	0,96	0,95	0,98	1,00	- 0,47	- 0,46
Program Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.939.450.000	577.785.950,00	1.140.000.000	762.316.500	94.925.000	1.955.881.026	545.052.003	887.512.787	748.184.003	94.518.000	0,98	0,94	0,78	0,98	1,00	- 0,95	- 0,95
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	3.434.538.000	3.336.363.200,00	2.288.000.000	1.270.455.330	2.570.720.000	3.431.462.450	3.093.007.580	2.057.700.270	1.156.056.330	2.570.692.600	1,00	0,93	0,90	0,91	1,00	- 0,25	- 0,25
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA				100.000.000	190.299.500				99.999.000	183.995.000				1,00	0,97		

Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	290.000.000	263.223.600.000	132.000.000	702.562.031	712.121.750	210.201.320	231.186.196	120.411.031	376.494.631	669.407.701	0,72	0,88	0,91	0,54	0,94	1,46	2,18
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	429.000.000			155.000.000	486.980.000	422.488.400			154.980.000	486.980.000	0,98	#DIWO!	#DIWO!	1,00	1,00	0,14	0,15
Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup			180.000.000	20.000.000	6.850.000			162.758.127	15.948.000	6.334.000			0,90	0,80	0,92	-	0,08
Program Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat				50.000.000	65.899.800				49.712.500	65.899.800				0,99	1,00		-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		93.174.110.000					81.483.744					0,87					
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	199.700.000					199.700.000					1,00					-	1,00 - 1,00
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	173.400.000					168.097.700.000					0,97					-	1,00 - 1,00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	30.450.000					30.450.000.000					1,00					-	1,00 - 1,00
TOTAL	10.007.666.000	13.005.717.500,00	13.693.500.000	11.789.781.689	12.497.915.952	9.649.827.486	12.111.645.971	12.536.813.834	11.191.591.393	12.217.985.462	0,96	0,93	0,92	0,95	0,98	0,25	0,27

Page 2

Tabel 2.3.19 diatas menunjukkan bahwa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.007.666,- dan realisasi sebesar Rp. 9.649.829, sisa anggaran sebesar Rp. 357.837,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016 adalah 0,96. dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 13.005.718,- dan realisasi sebesar Rp. 12.111.646,- sisa anggaran sebesar Rp. 894.072,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2017 adalah 0,93 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.693.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1s2.536.814,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.156.686,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2018 adalah 0,92 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.789.782,- dan realisasi sebesar Rp. 11.191.591,- sisa anggaran sebesar Rp. 598.191,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2019 adalah 0,95 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.497.916,- dan realisasi sebesar Rp. 12.217.985, sisa anggaran sebesar Rp. 279.931,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2020 adalah 0,98 dengan kategori baik.

Berdasarkan uraian diatas, pencapaian kinerja pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 yang sudah mencapai target dapat dikatakan efektif dan efisien sedangkan yang belum mencapai target dapat dikatakan kurang efektif dan kurang efisien. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi yang sudah mencapai target adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Cakupan Area Pelayanan, Persentase Jumlah Sampah yang tertangani. Sedangkan yang belum mencapai target adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti,

Persentase timbunan sampah yang ditangani, persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, dan operasionalisasi TPA/TPSP/SPA.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan yang semakin meningkat.
- b. Meningkatnya pencemaran Lingkungan (air, udara dan tanah) yang terjadi secara terus menerus.
- c. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.
- d. Pengetahuan, Pemahaman dan Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih rendah tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dalam masyarakat yang masih harus ditingkatkan.
- f. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.
- g. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.
- h. Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup belum memadai.
- i. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dioptimalkan antara lain :

- a. Issu lingkungan merupakan isu nasional dan global.
- b. Komitmen Kepala Daerah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang baik.
- d. Adanya CSR bidang lingkungan hidup dari perusahaan-perusahaan swasta.
- e. Berkembangnya instrument-instrumen bidang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintah pusat/provinsi.
- f. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan untuk investasi wisata.
- g. Menempatkan isu gender dalam program dan kegiatan pengelolaan lingkungan.
- h. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti program pembinaan kampung iklim, program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, program penyebarluasan informasi lingkungan hidup.
- i. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Tersedianya Laboratorium Lingkungan

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola untuk menjawab tantangan yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DLH

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari pengertian di atas, maka lingkungan hidup dilihat sebagai satu kesatuan antara manusia dan perilakunya dengan sumberdaya alam dan berbagai karakteristiknya. Dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, peran manusia sangat menentukan kelestarian dan keberlanjutan manfaat sumber-sumber alam yang ada. Manusia tidak harus melihat sumberdaya hanya sebagai potensi ekonomi tetapi harus melihat sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia secara totalitas.

Oleh karena itu, untuk efektivitas dan optimalitas diperhatikan faktor-faktor internal dan external dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan. Faktor-faktor lingkungan strategik pada ekosistem alam tidak sama dengan ekosistem buatan. Demikian pula halnya dengan ekosistem hutan pegunungan, ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem wilayah pesisir, ekosistem mangrove, ekosistem estuaria, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem laut dalam, dan ekosistem wilayah perkotaan dan industri, serta ekosistem-ekosistem lainnya.

Mengingat keragaman faktor-faktor strategik pada berbagai ekosistem ini, maka program-program pengendalian dampak lingkungan perlu dirumuskan berdasarkan ciri dan karakter khas masing-masing ekosistem. Perkembangan kondisi lingkungan dalam pembangunan di Kepulauan Selayar, secara terus menerus mengalami tekanan yang menyebabkan

terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sebagian daerah telah terjadi perusakan hutan yang menyebabkan berbagai dampak lingkungan seperti terjadinya banjir, erosi dan longsor, sedimentasi baik pada alur-alur sungai maupun pada muara, produktivitas menurun dan kemiskinan semakin meluas. Dampak terhadap ekosistem yang lebih luas adalah terjadinya penurunan keanekaragaman hayati, punahnya spesies endemik dan terjadinya perubahan cuaca/iklim.

Semua dampak lingkungan di atas, terjadi akibat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, seperti pelestarian keanekaragaman hayati, pemantapan hubungan ekologis komponen-komponen ekosistem dan perbaikan produktivitas lingkungan/ kesehatan biologis.

Oleh karena itu, program pembangunan lingkungan perlu diprioritaskan pada elemen-elemen lingkungan strategis seperti sosialisasi dan implementasi peraturan perundangan lingkungan hidup, penataan kembali fungsi dan sistem pengawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, penetapan dan pengamanan kawasan-kawasan konservasi, rehabilitasi lahan-lahan kritis serta ekosistem-ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan. adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih lemahnya sistem, kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.	Lebih cepatnya perkembangan tuntutan kebutuhan pelayanan publik dibanding kapasitas sistem, kelembagaan, dan pengawasan.	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem dan kelembagaan pemerintahan serta pengawasan.
2.	Terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati.	Terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.	Adanya gangguan atas kualitas air dan udara dan ancaman pemanfaatan ambang batas lingkungan.

Masalah pokok merupakan masalah yang sifatnya makro bagi daerah, yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan penyebab-penyebab dari masalah pokok, yang mana dapat dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, yang pemecahannya melalui rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum. Berikut permasalahan Dinas Lingkungan Hidup :

- a. Kurangnya fasilitas sarana prasarana dan tenaga pengelola persampahan;
- b. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup;
- d. Masih rendahnya pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun
- e. Masih tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor
- f. Makin berkurangnya sumber-sumber mata air
- g. Belum adanya kebun raya kabupaten.

Kondisi lingkungan strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program strategis sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar 2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2016-2021, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2025, substansi RPJM Nasional 2020-2026, maka Visi Pembangunan Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Kawasan Timur Indonesia maksudnya berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan atau hubungan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku dan Maluku Utara

Indikator Utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan dan satu program Unggulan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa;
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau Panjang;
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

4. GERBANG SARI (Gerakan membangun desa mandiri)

Gerbang Sari adalah program pembangunan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah untuk membangun Desa pada dua dimensi pembangunan, yaitu peningkatan klasifikasi status desa pada dimensi pertama dan pada dimensi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi Program Gerbang Sari ini bertujuan untuk meningkatkan status desa mejadi desa mandiri.

Sebagai indikator capaian dari program Gerbang sari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

Dukungan Dinas Lingkungan Hidup dalam Gerbang Sari adalah melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sesuai amanat RPJPD 2005-2025, maka dalam lima tahun kedepan, agenda prioritas daerah akan diimplementasikan Tiga Pilar Pembangunan Daerah dan satu Program Unggulan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun masih terdapat permasalahan pokok daerah bidang urusan Lingkungan Hidup yang dapat menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati.

Misi adalah upaya umum dalam mewujudkan visi. Maka misi yang diajukan oleh Kepala Daerah Terpilih pada Periode 2021-2026 adalah:

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman.
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Maka tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah;
2. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal;
4. Meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman;
6. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya;
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan;
8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.2.1.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati
 Kepulauan Selayar

Visi: “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Semakin tingginya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatnya pencemaran lingkungan 2. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan belum optimal 3. Lemahnya Pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup 4. Belum sinerginya pengelolaan lingkungan hidup antar sektoral terkait 5. Terbatasnya sumberdaya, mencakup alat, SDM 6. Masih maraknya aktivitas pembangunan	1. Belum tersedianya pedoman umum, juknis, juklat tingkat daerah mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Masih terbatasnya SDM DLH baik secara kuantitas maupun secara kualitas 3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup	1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang RTRW 3. Tersedianya APBD 4. Tersedianya Laboratorium Lingkungan Hidup.

		<p>yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>7. Masih rendahnya pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun</p> <p>8. Masih tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor</p> <p>9. Makin berkurangnya sumber-sumber mata air</p>		
--	--	--	--	--

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2026, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2026.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2026 adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah;
3. Penurunan Laju Deforestasi;
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya;
6. Luas Kawasan bernilai Konservasi Tinggi.

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tabel. 3.3.1

Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan SDA secara terus menerus dan berlebihan serta penggunaan bahan/alat yang tidak ramah lingkungan 2. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia 3. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melepaskan emisi ke Udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder 2. Lemahnya pengawasan terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan 3. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pngendalian Pencemaran Air 2. PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup 3. PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan 5. Masyarakat banyak membuang limbah ke sungai 6. Meningkatnya pemanasan global 7. Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3	4. Tidak adanya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup 5. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak 6. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengelolaan persampahan 7. Keterbatasan alokasi anggaran	4. Pergub. No.14 Tahun 2011 Tentang Limbah B3

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2019-2023, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigas perubahan iklim. Selanjutnya, untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2019-2023.

Sehingga sasaran strategis yang ingin dicapai DPLH Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023 adalah :

- (1) Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Indeks Kualitas Air Laut; Persentase Lokasi Kerusakan Lingkungan yang dipulihkan; Persentase Beban Pencemaran dari sumber tertentu.
- (2) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah), dengan indikator kinerja Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah.
- (3) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Limbah, limbah Beracun dan Persampahan, dengan indikator Persentase Timbulan Sampah; Persentase Padatan Limbah B3 yang berubah menjadi abu.
- (4) Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan indikator Presentase Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak dalam Pengelolaan Sumber daya Alamnya.
- (5) Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan, dengan indikator Presentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah; Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan dikeluarkan rekomendasinya.

Tabel. 3.3.2

Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra DPLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia	1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak limbah dan sampah yang	1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>2. Masyarakat banyak membuang limbah ke sungai</p> <p>3) Meningkatnya kerusakan di dalam dan sekitar kawasan konservasi</p> <p>4) Adanya illegal fishing, alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak, serta penambangan pasir laut dan muara sungai</p> <p>5) Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan</p>	<p>terbuang ke lingkungan</p> <p>2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan konservasi untuk perlindungan spesies yang langka</p>	<p>2. PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Regulasi perlindungan kawasan konservasi lautan dan laut</p> <p>4. Adanya lembaga TNTB dan Coremep yang melaksanakan sosialisasi pada masyarakat di wilayah pesisir dan laut</p>
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)	<p>1) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melepaskan emisi ke Udara.</p> <p>2) Meningkatnya pemanasan global</p> <p>3) Terjadinya perubahan kondisi iklim secara global</p>	<p>1) Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak</p> <p>2) Bertambahnya pemakaian AC dan sejenisnya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan</p>	1) Telah dilaksanakannya pemantauan Kualitas Udara Perkotaan setiap Tahunnya
3	Meningkatnya Efektifitas	Pengelolaan sampah masih berbasis	Pengadaan sarana	Adanya bantuan sarana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengelolaan Limbah, limbah Beracun dan Persampahan	tradisional “Kumpul Angkut Timbun” dan belum berbasis teknologi	prasarana pengelolaan sampah merupakan kewenangan OPD lain	penanganan sampah dari dana DAK
4	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1) Kurangnya minat masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan	Adanya kebijakan strategis kepala daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah RT
5	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	1) Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersinggungan dengan sektor lain	1) Kurangnya pengawasan dan pengendalian dampak terhadap kegiatan pembangunan 2) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemar 3) Tidak adanya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup.	1) Komitmen Kepala Daerah dalam mengawal pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan 2) Adanya rencana pembuatan Dokumen RPPLH dan KLHS 3) SPPL, UKL-UPL, AMDAL yang menjadi Persyaratan Perizinan

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan

peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritimserta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih

terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
 7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan

3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.
- Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
- Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
 2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan Lembaga serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata

Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional

Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;

3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam

tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

1. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan lingkungan hidup, yakni program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, program utama ini terdiri dari dua sub program yakni :

1. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan
2. Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, DLH Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

Tabel 3.4.1.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 2. Rehabilitasi/ Revitalisasi Kawasan 3. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan	1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Meningkatnya Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya 3. Belum ada perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan	1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis provinsi. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan.	1. Perda No 5 Tahun 2012 tentang RTRW 2. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS)

Tujuan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

- 1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2021-2026 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.

- 3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.
- 4) Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD. Adapun rekomendasinya adalah :

- 1) Pemda perlu menyediakan infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana.
- 2) Pemda perlu membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam keadaan rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan keguncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.
- 3) Pemda wajib menghilangkan kelaparan dan menjamin akses semua orang dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup.
- 4) Pemda wajib meningkatkan angka penanganan sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
- 5) Pemerintah pusat, provinsi dan daerah wajib memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- 6) Pemda perlu menahan laju penambahan jumlah KPM dalam keadaan BAU dengan melakukan intervensi kebijakan dengan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan.
- 7) Pemerintah pusat, provinsi dan daerah wajib menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,

teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

- 8) Pemda perlu meningkatkan pola konsumsi pangan yang aman, merata dan berkualitas terutama pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita dan wilayah rentan masalah gizi (daerah dengan prevalensi tinggi masalah malnutrisi/wasting)
- 9) Pemerintah pusat, provinsi dan daerah wajib mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Balita.
- 10) Pemda wajib mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- 11) Pemda harus menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.
- 12) Pemda perlu menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- 13) Pemda perlu menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- 14) Pemda perlu menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
- 15) Pemda perlu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

- 16) Pemda perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang .
- 17) Pada tahun 2030, Pemda wajib mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. \Pemda Secara signifikan perlu mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- 18) Pemda perlu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- 19) Pemda perlu memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- 20) Pemda perlu meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2021 – 2026, diperkirakan akan menghadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah kiriman dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi;
- f. Peningkatan mutu laboratorium Lingkungan Hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional;
- g. Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- h. Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan. Upaya konservasi ekosistem mangrove dapat mengurangi 10-31% pelepasan emisi karbon tahunan dari sektor penggunaan lahan di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya :
 - 1. strategi pengelolaan ekosistem mangrove;
 - 2. pengendalian, pemanfaatan dan konservasi ekosistem mangrove dengan memperhatikan prinsip kelestarian ;
 - 3. rencana rehabilitasi ekosistem mangrove;
 - 4. penguatan kelompok kerja mangrove dan penguatan forum peduli mangrove; dan
 - 5. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria

penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 3.5.1 dan tabel 3.5.2 berikut ini:

Tabel 3.5.1

Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.5.2
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	20	10	20	10			60
2	Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			20	10	15		45
3	Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		10	20	10	15		55
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	20	10	20	10		25	85
5	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah kiriman dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi	20	10	20	10			60
6	Peningkatan mutu laboratorium Lingkungan Hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional		10	20	10			40
7	Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis dan kemerosotan keanekaragaman hayati	20	10	20	10			60
8	Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan	20	10	20	10			60

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan.

Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2020, substansi RPJM Nasional 2020-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJMNasional dalam bentuk,sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2020-2026 adalah :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, mengemban amanah dengan melaksanakan misi pertama, misi kedua dan misi keenam yaitu :

Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

Misi 6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Misi 1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas ketahanan lingkungan perdesaan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan sebelum dan sesudah perubahan dapat di lihat pada Tabel 4.1.1 dan Tabel 4.1.2 dibawah ini:

Tabel 4.1.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
(sebelum perubahan)

MISI	TUJUAN
1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan perdesaan	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 4.1.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
(setelah perubahan)

MISI	TUJUAN
- Meningkatkan kualitas Pembangunan perdesaan	- Meningkatkan kualitas ketahanan lingkungan pedesaan
- Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan transparan	- Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas komponen manajemen kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran
Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
(Sebelum Perubahan)

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mengembangkan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH	-Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat -Meningkatnya Nilai SAKIP -Meningkatnya tertib Administrasi Pengelolaan keuangan Dan aset
3. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan	-Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	-Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	-Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 4.2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran
Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
(Setelah Perubahan)

MISI	TUJUAN	SASARAN
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pembanguinan perdesaan - - Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup - Mengembangkan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas ketahanan lingkungan perdesaan - Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup - Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan - Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup - Meningkatnya Nilai SAKIP - Meningkatnya tertib Administrasi Pengelolaan laporan keuangan pemerintahan Perangkat Daerah sesuai SAP Dan asset - Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 4.2.2. di bawah ini:

Tabel 4.2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DLH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
(Sebelum Perubahan)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH		Nilai SAKIP DLH (B)		60,32	60,32	60,32	60,32	60,32	
		1.1	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1.1	Nilai Perencanaan Kinerja	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57
				1.1.2	Nilai Pengukuran Kinerja	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
				1.1.3	Nilai Pelaporan Kinerja	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
				1.1.4	Nilai Evaluasi Internal	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1.2.1	Indeks Kepuasan Layanan	1,00	1,50	1,76	2,00	2,51
1.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.1	Laporan Keuangan DLH sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai		
2.	Meningkatkan kualitas ketahanan lingkungan perdesaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	35,04	35,08	35,12	35,16	35,20	
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,46	64,80	66,14	67,48	68,82	
		3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
				3.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,39	85,49	85,59	85,69	85,79
				3.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,57	45,06	47,56	50,06	52,56

Tabel 4.2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DLH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 (Setelah Perubahan)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		73	75	80	83	85		
		1.1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLH	1.1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	
				1.2.1	Indeks Kepuasan Layanan	1,00	1,50	1,76	2,00	2,51
				1.3.1	Laporan Keuangan DLH sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Meningkatkan kualitas ketahanan lingkungan perdesaan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0	0,5	0,6	0,8	1		
		2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		35,04	35,08	35,12	35,16	35,20
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,46	64,80	66,14	67,48	68,82		
		3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
				3.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,39	85,49	85,59	85,69	85,79
				3.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,57	45,06	47,56	50,06	52,56

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan SKPD DLH harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan optimal maka perlu dilakukan analisis SWOT terhadap potensi dan faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal Dinas Lingkungan Hidup. hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
b. Memiliki sekolah Adiwiyata c. Memiliki Bank Sampah d. Adanya Taman Hijau e. Ekosistem mangrove seluas 312,8 Ha f. Adanya Laboratorium Lingkungan g. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti program pembinaan kampung iklim, program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, program penyebarluasan informasi lingkungan hidup. f. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.	a. Jumlah kendaraan operasional yg rusak b. Luasnya wilayah pelayanan persampahan. c. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas. d. Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup belum memadai. e. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dalam masyarakat yang masih harus ditingkatkan.

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> a. Issu lingkungan merupakan isu nasional dan global. b. Komitmen Kepala Daerah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang baik. d. Adanya CSR bidang lingkungan hidup dari perusahaan-perusahaan swasta. e. Berkembangnya instrument-instrumen bidang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintah pusat/provinsi. f. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan untuk investasi wisata. g. Menempatkan isu gender dalam program dan kegiatan pengelolaan lingkungan. h. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti program pembinaan kampung iklim, program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, program penyebaran informasi lingkungan hidup. i. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak b. aktivitas pembangunan yang semakin meningkat. c. Meningkatnya pencemaran Lingkungan (air, udara dan tanah) yang terjadi secara terus menerus. d. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan. e. Pengetahuan, Pemahaman dan Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih rendah tentang pengelolaan lingkungan hidup. f. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dalam masyarakat yang masih harus ditingkatkan. g. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD. h. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada setiap misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5.2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

VISI: “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
MISI-1: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan reformasi dan birokrasi perangkat daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLH	1.Peningkatan kualitas Perencanaan Program dan anggaran 2.Peningkatan fungsi Pengawasan internal DLH 3.Peningkatan tertib administrasi umum DLH	1. Meningkatkan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi kinerja 2. Meningkatkan tertib Pengelolaan Administrasi keuangan serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel 3. Meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perlengkapan dan aset yang akuntabel serta kepuasan layanan public
MISI-2 :			

Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas ketahanan lingkungan perdesaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pengelolaan persampahan perdesaan	Meningkatkan kinerja persampahan

MISI-6 :

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Ruang Sesuai Peruntukannya 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup 3. Pengembangan Koordinasi Kelembagaan Partisipatif dalam meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup 4. Peningkatan Pola Konservasi SDA secara berjenjang dan berkesinambungan 5. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi 6. Peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya 2. Meningkatkan kesadaran, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan 3. Mengendalikan Dampak pencemaran lingkungan hidup, khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara dan tanah 4. Meningkatkan upaya pelestarian SDA dan kualitas Lingkungan Hidup 5. Meningkatkan Kinerja pengelolaan sampah terpadu 6. Meningkatkan
---	--	---	---

		kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah B3
--	--	--	--

Visi Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan dan satu program Unggulan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa; Partisipasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan Kawasan Distribusi Logistik adalah pengelolaan ruang terbuka hijau di beberapa tahapan pembangunan kawasan. Pengelolaan ruang terbuka adalah merupakan salah satu kegiatan dari program pengelolaan keanekaragaman hayati
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau Panjang;
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Pada pembangunan kawasan Industri Perikanan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup akan berkontribusi pada Program Pengelolaan Sampah dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara. di dua lokasi.

4. GERBANG SARI (Gerakan membangun desa mandiri)

Gerbang Sari adalah program pembangunan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah untuk membangun Desa pada dua dimensi pembangunan, yaitu peningkatan klasifikasi status desa

pada dimensi pertama dan pada dimensi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi Program

Gerbang Sari ini bertujuan untuk meningkatkan status desa mejadi desa mandiri. Pada program ini Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada penyediaan tempat pembuangan sampah sementara pada program Pengelolaan Persampahan lokasi Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki Tahun 2024.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program Prioritas Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Puncak Tanadoang. Konsep Kebun Raya Puncak Tanadoang merupakan perwujudan kearifan ekologis dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang berfungsi sebagai area perlindungan keberlangsungan ekosistem disamping fungsi sosial dan ekonomi sebagai obyek wisata alam dan wisata pendidikan.

Puncak Tanadoang yang akan dijadikan lokasi Kebun Raya seluas 3,4 Ha terletak di Dusun Gollek Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai merupakan ex lokasi perkemahan pramuka dengan ketinggian 453 mdpl. Lokasi ini merupakan milik pemerintah Kab.Kepulauan Selayar dengan topografi yang relatif datar hingga curam. Jarak Lokasi ini dari pusat kota + 121 km dengan kondisi jalan hotmix dari pusat kota. Di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2012-2023, area ini merupakan kawasan hutan lindung, kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan peternakan. Lokasi ini memiliki view yang sangat menarik kearah laut khususnya saat matahari terbenam, kita akan disuguhi pemandangan malam Kota Benteng, sehingga masyarakat sengaja berkunjung untuk dapat menikmati kerlip lampu Kota Benteng dari kejauhan. Lokasi ini juga sudah memiliki Fasilitas Umum seperti Toilet, Cafe, Bangku-bangku Taman, Viewing dek, Area Parkir dan Guest House.

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota;
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, baik akibat aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati serta menjaga tanaman endemik lokal dari kepunahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari bahan berbahaya dan beracun dan bahan berbahaya dan beracun. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan dampak yang disebabkan oleh aktivitas industri

dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat serta pengetahuan tradisional masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan PPLH. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH,

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.
- d. Penyusunan Kebijakan dan strategi Daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengumpulan data dan Penyusunan Dokumen JAKSTRADA.
- e. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaurulang, dan pemanfaatan kembali melalui pembentukan bank sampah unit di setiap Desa/Kelurahan terutama Desa yang termasuk lokus gerbangsari.
- f. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan sampah.
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan pemberian bantuan alat dan bahan dalam rangka daur ulang sampah baik kerajinan maupun kompos.

- h. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dianggarkan pada anggaran DAK tahun berikutnya.
- i. Penyusunan Kebijakan kerjasama (Perjanjian Kerja sama/MOU) pengelolaan persampahan dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan atau Pihak Swasta.
- j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.

6.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. SKPD pengelola lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. SKPD lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Sekolah/Dunia Pendidikan.
5. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup.
6. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan LSM.

6.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel 6.3.1. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Program Strategis dan Program Prioritas, Program dan kegiatan investasi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 6.3.2 dan pada table 6.3.3. sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
(1)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH	Meningkatnya Nilai SAKIP DLH	Nilai SAKIP DLH				54.10	60.32		60.32		60.32		60.32		60.32		60.32			
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai perencanaan kinerja				18.91	19.57		19.57		19.57		19.57		19.57		19.57			
			Nilai pengurangan kinerja				12.50	13.75		13.75		13.75		13.75		13.75		13.75			
			Nilai pelaporan kinerja				6.98	8.99		8.99		8.99		8.99		8.99		8.99			
			Nilai evaluasi internal				3.17	4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat				0.66	1.00		1.50		1.76									
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan DLH sesuai SAP				sesuai	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)		
				2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			7,823,365,000	100	7,930,466,867	100	8,128,966,453	100	8,323,980,358	100	8,522,590,529	100	8,522,590,529		Sekretariat	DLH	
						Persentase Capaian Kinerja	50.91	63.03		70.28		70.53		71.51		72.31		72.31				
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35	83.00		85.00		88.00		91.00		95.00		95.00				
				2 11 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100	100	103,000,000	100	107,000,000	100	122,000,000	100	134,000,000	100	146,000,000	100	146,000,000		Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Rencana/RKT) yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	44,129,600	3 Dokumen	45,000,000	3 Dokumen	48,000,000	3 Dokumen	48,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000		Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS KPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000		Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		Subbagian Program	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Anggaran DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran DPA SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKP J /LPPD/Buku Profil) yang tersusun	3 Laporan	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	12,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev/PK) yang	13 Dokumen	13 Dokumen	32,870,400	13 Dokumen	33,000,000	13 Dokumen	35,000,000	13 Dokumen	40,000,000	13 Dokumen	45,000,000	13 Dokumen	45,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	100	100	3,337,286,615	100	3,434,202,067	100	3,438,000,000	100	3,445,000,000	100	3,460,000,000	100	3,460,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang telah menerima gaji dan tunjangan	39 Orang	39 Orang	3,253,657,015	39 Orang	3,348,202,067	39 Orang	3,350,000,000	39 Orang	3,355,000,000	39 Orang	3,360,000,000	39 Orang	3,360,000,000	Subbagian Keuangan	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
				2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	9,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	12 Laporan	12 Laporan	63,200,000	12 Laporan	64,000,000	12 Laporan	65,000,000	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	70,000,000	12 Laporan	70,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2.11.01.2.02.08	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF- K yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	13,429,600	12 Laporan	14,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun	100	100	46,000,000	100	48,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	Subag. Umum, K epegaw aian, & Hukum	DLH
				2.7v.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	26,000,000	4 Laporan	28,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	35,000,000	4 Laporan	35,000,000	Subag. Umum, K epegaw aian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset (BI, KIR, KIB, CIL) yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	Subag. Umum, K epegaw aian, & Hukum	DLH
																					DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
				2 11 01 2 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun		85.71	205,500,000	85.71	208,500,000	85.71	215,000,000	85.71	215,000,000	85.71	222,000,000	85.71	222,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Retribusi Persampahan yang tersusun	0 Dokumen			1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Persampahan yang terdaftar	2176 Buah	2.176 Buah	200,500,000	2.176 Buah	200,500,000	2.176 Buah	201,000,000	2.176 Buah	201,000,000	2.176 Buah	205,000,000	2.176 Buah	205,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Persampahan yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun	100	100	58,400,000	100	71,000,000	100	98,000,000	100	153,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dan Atribut Aparatur yang diadakan	0 Pasang							350 Pasang	55,000,000	350 Pasang	60,000,000	350 Pasang	60,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	22,400,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen SIMPEG (Anjab, Rekap Kehadiran) yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	11,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.05.09	Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur LH yang ikut Diklat	2 Orang	5 Orang		5 Orang	10,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur LH yang ikut sosialisasi	0 Orang									2 Orang	20,000,000	2 Orang	20,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum yang tersedia	85.71	100	194,124,000	100.00	199,000,000	100	212,000,000	100.00	229,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	50 Buah	50 Buah	8,000,000	50 Buah	9,000,000	50 Buah	10,000,000	50 Buah	12,000,000	50 Buah	15,000,000	50 Buah	15,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jumlah Barang Cetak (Spanduk)	3 Buah	10 Buah	6,000,000	10 Buah	8,000,000	10 Buah	8,000,000	10 Buah	9,000,000	10 Buah	10,000,000	10 Buah	10,000,000	Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Klipping Bahan Bacaan Koran dan Buku Produk Hukum terkait LH yang tersedia	1 Buah	3 Buah	5,000,000	3 Buah	6,000,000	3 Buah	8,000,000	3 Buah	8,000,000	3 Buah	10,000,000	3 Buah	10,000,000	Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Dinas yang terfasilitasi		500 Orang	25,000,000	500 Orang	25,000,000	500 Orang	26,000,000	500 Orang	30,000,000	500 Orang	30,000,000	500 Orang	30,000,000	Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi DLH yang tersusun	136 Laporan	136 Laporan	150,124,000	136 Laporan	151,000,000	136 Laporan	160,000,000	136 Laporan	170,000,000	136 Laporan	180,000,000	136 Laporan	180,000,000	Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan LH yang diadakan		33.33	102,180,000	33.33	71,000,000	38.46	125,000,000	43.59	185,000,000	43.59	202,000,000	43.59	202,000,000	Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Motor Dinasyang diadakan				1 Unit	30,000,000	3 Unit	65,000,000	4 Unit	95,000,000	4 Unit	120,000,000	4 Unit	120,000,000	Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan		1 Unit	73,200,000	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Subag. Umum, K epegawaian, & Hukum	DLH

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)																					
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra																				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.																			
				2	11	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerjaya yang diadakan			10	Buah		12,000,000	10	Buah		13,000,000	10	Buah		15,000,000	10	Buah		16,000,000	10	Buah		20,000,000	20,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH				
											Jumlah Kursi Kerja yang diadakan							50	Buah		10,000,000	50	Buah		15,000,000	50	Buah		15,000,000	50	Buah		20,000,000	20,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH				
				2	11	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC yang diadakan			2	Buah		16,980,000	2	Buah		18,000,000	3	Buah		30,000,000	3	Buah		30,000,000	5	Buah				Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH				
											Jumlah Alat Penyimpan Arsip yang diadakan																2	Buah		10,000,000	2	Buah		10,000,000		Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH			
											Jumlah Laptop yang diadakan															2	Buah		20,000,000	1	Buah		22,000,000	1	Buah		22,000,000		Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
											Jumlah Printer yang diadakan															2	Buah		9,000,000	2	Buah		10,000,000	2	Buah		10,000,000		Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
				2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas elayanan jasa penunjang DLH yang tersedia	100	100				2,872,284,385	100	100																			Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH	
				2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	341	Buah	350	Buah		25,389,400	350	Buah		27,000,000	350	Buah		30,000,000	350	Buah		30,000,000	350	Buah		30,000,000	350	Buah		30,000,000		Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
				2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air yang tersedia	3	Buah	3	Buah		66,442,185	3	Buah		67,000,000	3	Buah		70,000,000	3	Buah		70,000,000	3	Buah		70,000,000	3	Buah		70,000,000		Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
				2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL sebagai pelayan umum DLH	281	Orang	304	Orang		2,780,452,800	304	Orang		2,783,764,800	304	Orang		2,783,764,800	304	Orang		2,783,764,800	304	Orang		2,817,590,529	304	Orang		2,817,590,529		Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
																																					DLH			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)							
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.					
			2	11	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD DLH yang terpelihara		16.31	904,590,000	16.31	914,000,000	16.31	980,201,653	17.73	1,024,215,558	17.73	1,075,000,000	17.73	1,075,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH	
			2	11	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan .Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	41,270,000	2 Unit	42,000,000	2 Unit	45,000,000	2 Unit	46,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
									Jumlah Motor Dinas yang terpelihara	48 Unit	12 Unit	6,000,000	12 Unit	8,000,000	12 Unit	12,000,000	12 Unit	12,000,000	12 Unit	15,000,000	12 Unit	15,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH	
			2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan .Biaya Pemeliharaan .Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	26 Unit	40 Unit	762,750,000	40 Unit	765,000,000	40 Unit	770,000,000	40 Unit	785,000,000	40 Unit	800,000,000	40 Unit	800,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
			2	11	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan .Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah alat berat yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	44,000,000	2 Unit	46,000,000	2 Unit	55,000,000	2 Unit	66,215,558	2 Unit	75,000,000	2 Unit	75,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
			2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/P erengkapan /Mesin TPA/TPS T yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	20,550,000	10 Unit	21,000,000	10 Unit	63,201,653	10 Unit	75,000,000	10 Unit	85,000,000	10 Unit	85,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH
			2	11	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Ban gunan TPA/TPST/L AB yang terpelihara	1 Unit	5 Unit	30,020,000	5 Unit	32,000,000	5 Unit	35,000,000	5 Unit	40,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	Subag. Umum, K epegawa ian, & Hukum	DLH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup			IKLH (74,28)	63.46		64.80		66.14		67.48		68.82		68.82				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air			IKA (50,00)	52.00		54.00		56.00		58.00		60.00		60.00				
			Indeks Kualitas Udara			IKU (88,80)	85.39		85.49		85.59		85.69		86.79		85.79				
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan			IKTL (89,12)	42.57		45.06		47.56		50.06		52.56		52.56				
		2 11 02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kab	0.00	12.50	350,000,000	12.50	354,791,500	25.00	363,671,931	37.50	372,396,421	37.50	381,281,799	37.50	381,281,799	B. Penataan & Penataan PPLH
		2 11 02 2 01				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	0.00	12.50	350,000,000	12.50	284,491,580	25.00	291,671,931	37.50	302,396,421	37.50	310,000,000	37.50	310,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH
		2 11 02 2 01 01				Penyusunan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dan ditetapkan	0	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	284,491,580	1 Dokumen	Rp 291,671,931	1 Dokumen	247,396,421	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH
							Jumlah dokumen IKLH														B. Penataan &
							Jumlah dokumen IKPLHD		1 Dokumen												B. Penataan &

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)												
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra											
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.										
				2	11	02	2	01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi RPPLH	0						1	Dokumen	55,000,000	1	Dokumen	60,000,000	1	Dokumen	60,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Benteng			
				2	11	02	2	02	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	16.00			20	70,299,920	28	72,000,000	32	70,000,000	32	71,281,799	32	71,281,799	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar					
				2	11	02	2	02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk Kajian Rencana Program yang tersusun	0 Dokumen			1	Dokumen	70,299,920	1	Dokumen	72,000,000	1	Dokumen	70,000,000	1	Dokumen	71,281,799	1	Dokumen	71,281,799	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
				2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2.59	2.59	1,980,000,000	2.59	2,007,106,200	2.59	2,057,344,068	2.59	2,106,699,752	2.59	2,156,965,608	2.59	2,156,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH						
				2	11	03	2	01	01	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	7.14	10	1,435,000,000	10	1,152,106,200	10	1,155,000,000	10	1,196,699,752	10	1,215,965,608	10	1,215,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Bontosikuyu, Kec. Benteng.					
				2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pencegahan pencemaran sampah dan limbah B3	5 Buah	5 Buah	60,000,000	16	152,106,200	16	155,000,000	16	160,000,000	16	165,000,000	16	165,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
				2 11 03 2 01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah laporan hasil uji terhadap media air, udara dan tanah	54 Buah	50 Buah	375,000,000	50 Buah	1,000,000,000	50 Buah	1,000,000,000	50 Buah	1,036,699,752	50 Buah	1,050,965,608	50 Buah	1,050,965,608	B.	DLH
						Jumlah Alat Laboratorium		2 Unit	1,000,000,000											B.	Desa Harapan Kec. Benteng Selatan Kec. Benteng
				2 11 03 2 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.00	25	35,000,000	25	200,000,000	25	216,344,068	25	217,000,000	25	220,000,000	25	220,000,000	B.	Selayar
				2 11 03 2 02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan LH terhadap sungai yang terkontaminasi bahan pencemar	0 Buah	2 Buah	35,000,000	2 Buah	200,000,000	2 Buah	216,344,068	2 Buah	217,000,000	2 Buah	220,000,000	2 Buah	220,000,000	B.	Selayar
				2 11 03 2 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.002	0.047	510,000,000	0.047	655,000,000	0.047	686,000,000	0.047	693,000,000	0.047	721,000,000	0.047	721,000,000	B.	Selayar
				2 11 03 2 03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Luas Lahan yang dibersihkan unsur pencemarnya	0 Ha	2 Ha	130,000,000	2 Ha	100,000,000	2 Ha	130,000,000	2 Ha	132,000,000	2 Ha	145,000,000	2 Ha	145,000,000	B.	Kec. Benteng, Kec. Bontosisukyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu
				2 11 03 2 03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas Lahan yang dipulihkan melalui teknologi remediasi	0 Ha	1 Ha	225,000,000	1 Ha	305,000,000	1 Ha	306,000,000	1 Ha	306,000,000	1 Ha	306,000,000	1 Ha	306,000,000	B.	Kec. Benteng, Kec. Bontosisukyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 03 2 03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Lahan yang dipulihkan melalui metode rehabilitasi	1 Ha	10 Ha	155,000,000	10 Ha	250,000,000	10 Ha	250,000,000	10 Ha	255,000,000	10 Ha	270,000,000	10 Ha	270,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu
				2 11 04 2 01 01	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1.38	1.38	1,760,000,000	1.38	1,784,094,400	1.38	1,828,750,283	1.38	1,872,622,002	1.38	1,917,302,763	1.38	1,917,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
				2 11 04 2 01 02	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keaneekaragaman Hayati	2.30	2.31	1,760,000,000	2.31	1,784,094,400	2.31	1,828,750,283	2.31	1,872,622,002	2.31	1,917,302,763	2.31	1,917,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
				2 11 04 2 01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas tumbuhan lokal, endemik yang penyerbukannya oleh satwa terselamatkan dari ancaman kepunahan	0 Ha	3 Ha	60,000,000	3 Ha	59,594,400	3 Ha	74,750,283	3 Ha	100,000,000	3 Ha	115,000,000	3 Ha	115,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng
				2 11 04 2 01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas koleksi tumbuhan untuk kepentingan penelitian	0 Ha	5 Ha	500,000,000	5 Ha	497,000,000	5 Ha	500,000,000	5 Ha	377,622,002	5 Ha	382,000,000	5 Ha	382,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Dudun Gojang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai
				2 11 04 2 01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola	1868,98 Ha	20 Ha	1,000,000,000	20 Ha	1,027,500,000	20 Ha	1,029,000,000	20 Ha	1,100,000,000	20 Ha	1,115,000,000	20 Ha	1,115,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec.
				2 11 04 2 01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati Lainnya yang dikelola	0,42 Ha	0,42 Ha	100,000,000	0,42 Ha	100,000,000	0,42 Ha	115,000,000	0,42 Ha	175,000,000	0,42 Ha	180,000,000	0,42 Ha	180,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
				2 11 04 2 01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah sarpras taman kehati yang dikelola	0 Unit	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000	5 Unit	110,000,000	5 Unit	120,000,000	5 Unit	125,302,763	5 Unit	125,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi				
								2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase lembaga/perusahaan penghasil limbah B3 yang diawasi	100.00	100.00	110,000,000	100.00	111,505,900	100	114,296,893	100.00	117,038,875	100	119,831,423	100	119,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
				2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara		9.25	110,000,000	9.25	111,505,900	9.25	114,296,893	9.25	117,038,875	9.25	119,831,423	9.25	119,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang difasilitasi pemenuhan izin penyimpanan sementara limbah B3	5 Buah	5 Buah	80,000,000	5 Buah	61,505,900	5 Buah	62,000,000	5 Buah	64,000,000	5 Buah	65,000,000	5 Buah	65,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Benteng
				2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 yang divalidasi lapangan	5 Buah	5 Buah	30,000,000	5 Buah	50,000,000	5 Buah	52,296,893	5 Buah	53,038,875	5 Buah	54,831,423	5 Buah	54,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Benteng
				2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	63.64	64.00	115,000,000	64.00	116,574,350	66.00	119,492,206	68.00	122,358,824	70.00	125,278,306	70.00	125,278,306	B. Penataan & Peningkatan PPLH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)		
				2 11 06 2 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PULH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemda	6.36	1.33	115,000,000	3.33	116,574,350	16.67	119,492,206	23.33	122,358,824	23.33	125,278,306	23.33	125,278,306	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
				2 11 06 2 01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen AMDAL yang dinilai	1 Dokumen	1 Dok	30,000,000	1 Dok	35,000,000	1 Dok	36,500,000	1 Dok	37,000,000	1 Dok	38,278,306	1 Dok	38,278,306	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
						Jumlah Dokumen UKL-UPL yang diperiksa	11 Dokumen	10 Dok		10 Dok		20 Dok		30 Dok		30 Dok		30 Dok		30 Dok	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
						Jumlah Dokumen SPPL yang diperiksa	161 Dokumen	130 Dok		130 Dok		130 Dok		130 Dok		130 Dok		130 Dok		130 Dok	B. Penataan & Penataan	Selayar
				2 11 06 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas LH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	5 Orang	30,500,000	15 Orang	26,574,350	25 Orang	26,992,206	35 Orang	28,000,000	35 Orang	29,000,000	35 Orang	29,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
				2 11 06 2 01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai izin lingkungan terawasi	11 Buah	15 Buah	20,000,000	15 Buah	30,000,000	35 Buah	30,000,000	45 Buah	30,700,000	45 Buah	31,000,000	45 Buah	31,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
				2 11 06 2 01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upayadan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif terhadap ketidaktaatan PPLH	3 Buah	1 Buah	34,500,000	1 Buah	25,000,000	1 Buah	26,000,000	1 Buah	26,658,824	1 Buah	27,000,000	1 Buah	27,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKA THUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentas eMHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaanya	N/A	1.14	30,000,000	2.27	30,410,700	3.41	31,171,880	4.55	31,919,693	5.68	32,681,297	5.68	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
				2 11 07 2 01	PengakuanMHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentas eMHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	N/A	11.36	30,000,000	11.36	30,410,700	11.36	31,171,880	11.36	31,919,693	11.36	32,681,297	11.36	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 07 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait dengan PPLH yang diakui	0 Buah	1 Buah	30,000,000	1 Buah	30,410,700	1 Buah	31,171,880	1 Buah	31,919,693	1 Buah	32,681,297	1 Buah	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentas eLembaga Kemasyarakan yang diberikan diklat	N/A	23.08	60,000,000	23.08	60,821,400	23.08	62,343,760	23.08	63,839,386	23.08	65,362,594	23.08	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)							
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)															
				2	11	08	2	01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	0.00	100	60,000,000	100	60,821,400	100	62,343,760	100	63,839,386	100	65,362,594	100	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
				2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah mitra yang mendapat pendampingan gerakan peduli lingkungan	22 Buah	80 Buah	60,000,000	80 Buah	60,821,400	80 Buah	62,343,760	80 Buah	63,839,386	80 Buah	65,362,594	80 Buah	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	20.00	33.33	15,000,000	33.33	15,205,350	33.33	15,585,940	33.33	15,959,847	33.33	16,340,649	33.33	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH		
				2	11	09	2	01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	22.73	15.00	15,000,000	15.00	15,205,350	15.00	15,585,940	15.00	15,959,847	15.00	16,340,649	15.00	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
				2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang dinilai dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22 Buah	20 Buah	15,000,000	20 Buah	15,205,350	20 Buah	15,585,940	20 Buah	15,959,847	20 Buah	16,340,649	20 Buah	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 10	PROGRAM PENANGANA N PENGADUA N LINGKUNGA N HIDUP	Persentase Penangan an Pengaduan/ Kasus Lingkungan	80	100.00	35,000,000	100	35,479,150	100	36,367,193	100.00	37,239,642	100	38,128,180	100	38,128,180	B. Penataa n & Penaata n PPLH	
				2 11 10 2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan/ Kasus Lingkungan yang ditindaklan juti	80	100	35,000,000	100	35,479,150	100	36,367,193	100	37,239,642	100	38,128,180	100	38,128,180	B. Penataa n & Penaata n PPLH	Selayar
				2 11 10 2 01 01	Pengelolaa n Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan/ Kasus Lingkungan yang diregistrasi	10 Buah	1 Buah	15,000,000	1 Buah	15,000,000	1 Buah	15,500,000	1 Buah	16,239,642	1 Buah	16,500,000	1 Buah	16,500,000	B. Penataa n & Penaata n PPLH	Selayar
				2 11 10 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah pengaduan/ Kasus Lingkungan yang divalidasi	8 Buah	1 Buah	20,000,000	1 Buah	20,479,150	1 Buah	20,867,193	1 Buah	21,000,000	1 Buah	21,628,180	1 Buah	21,628,180	B. Penataa n & Penaata n PPLH	Selayar
	Meningka tkan Kualitas Pengelol aan Lingkung an Hidup	Meningkatk an kualitas pengelolaan persampaha n perdesaan	IKPS				35,04			35,08		35,12		35,16		35,20		35,20			
				2 11 11	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPAH AN	Persentase Pengelolaa n Persampaha n yang bernilai ekonomi	1.30	1.30	2,920,000,000	1.30	2,959,974,800	1.30	3,034,062,969	1.30	3,106,850,140	1.30	3,180,979,584	1.30	3,180,979,584	B. Pengel. Sampah ,Limbah B3, & Pening. Kapasita sLH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD/PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	14.22	14.23	2,920,000,000	14.23	2,959,974,800	14.27	3,034,062,969	14.35	3,106,850,140	14.46	3,180,979,584	14.46	3,180,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jastrada Pengelolaan Sampah yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
				2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan timbulan SRT-SSSRT	289,910,400	1 Ton	383,970,000	1 Ton	400,000,000	1 Ton	397,000,000	1 Ton	397,000,000	1 Ton	383,970,000	1 Ton	383,970,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng Bontoharu
						Jumlah SRT-SSSRT yang terdaur ulang di sumber sampah	549,31 Ton	633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
						Jumlah SRT-SSSRT yang dimanfaatkan kembali di sumber sampah		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
				2111120103	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan timbunan SRT-SSSRT	5449,95 Ton	6000 Ton	391,030,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	391,030,000	6000 Ton	391,030,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas sLH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan BontobangungKec. Bontoharu, Desa BontotanggaKec. Bontoharu
						Jumlah SRT-SSSRT yang terpilah di sumber sampah		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas sLH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan
						Jumlah SRT-SSSRT yang terangkut ke TPA (Ton)	5449,95 Ton	5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas sLH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah SRT-SSSRT yang terangkut ke Pusat TPST untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas sLH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah SRT-SSSRT yang terolah menjadi bahan baku		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas sLH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah SRT-SSSRT yang dimanfaatkan menjadi sumber energi		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas sLH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD P.J	Lokasi						
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)					
						Jumlah SRT-SSRT yang terproses di TPA	5449,95 Ton	5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai					
						Jumlah Kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	210,000	100000 M3		100000 M3		100000 M3		100000 M3		100000 M3		100000 M3	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai					
						Jumlah Daya Tampung TPS terhadap volume sampah	110 M3	190 M3		190 M3		190 M3		190 M3		190 M3		190 M3	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara					
			2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mempunyai Bank Sampah Aktif	3 Buah	3 Buah	50,000,000	3 Buah	50,000,000	5 Buah	50,000,000	5 Buah	50,000,000	2 Buah	35,000,000	11 Buah	35,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Desa Bona Raya
			2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana yang dikordinasikan penganggarnya melalui DAK/APBN/APBD Prov	5 Unit	3 Unit	85,000,000	3 Unit	85,000,000	3 Unit	85,000,000	3 Unit	85,000,000	2 Unit	58,000,000	3 Unit	58,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
			2	11	11	2	01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah MoU kerjasama pengelolaan sampah yang tersusun		3 Buah	30,000,000	3 Buah	30,000,000	3 Buah	30,000,000	3 Buah	30,000,000	2 Buah	20,000,000	3 Buah	20,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
			2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Ko	Jumlah Pusat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang tersedia		1 Unit	1,950,000,000	1 Unit	1,968,974,800	1 Unit	2,046,062,969		2,118,850,140		2,262,979,584		2,262,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara

							Jumlah Rumah Kampo s		1 Unit	500,000,000	11 Unit		11 Unit		11 Unit		1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	B. Pengel. Sampah ,Limbah B3, & Pening. Kapasita sLH	Kelurahan Benteng Utara
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--------	-------------	---------	--	------------	--	---------	--	--------	-------------	--------	-------------	---	-------------------------------

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD P.J	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
						Jumlah Mesin Komposter		11 Unit		11 Unit		11 Unit		11 Unit		1 Unit	140,000,000	1 Unit	140,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara
						Jumlah Alat Berat Loder		1 Unit				1 Unit	748,062,969							B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah Alat Berat Bolduser		1 Unit						1 Unit	548,850,140					B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah Jembatan Timbang TPA					1 Unit	100,000,000								B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah mesin penghancur kresek				1 Unit	30,000,000									B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai, Kelurahan Benteng Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
						Jumlah mesin penghancur plastik		11 Unit	60,000,000	11 Unit		11 Unit		11 Unit		11 Unit		11 Unit		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
						Jumlah Bank Sampah		2 Unit	200,000,000	6 Unit	490,974,800					3 Unit	202,979,584	2 Unit	202,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
						Jumlah Mesin Pencacah		1 Unit				1 Unit	50,000,000							B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Bontotangnga, Kel. Benteng Utara
						Jumlah Mesin Press		1 Unit	133,500,000							1 Unit	130,000,000		130,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Bontotangnga, Kel. Benteng Utara
						Jumlah Gerobak Pilah				1 Unit						1 Unit		1 Unit		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
						Jumlah Keranjang Takakura				50 Buah	4,000,000	50 Buah		50 Buah		50 Buah	5,000,000	50 Buah	5,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD P.J	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
						Jumlah Timbangan Duduk						1 Buah	5,000,000								B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah Timbangan Gantung				3 Buah	2,000,000										B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
						Jumlah Kontainer Sampah		11 Unit		1 Unit	40,000,000	2 Unit	78,000,000			1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
						Jumlah Motor Sampah Roda Tiga		2 Unit	241,500,000	2 Unit	242,000,000			2 Unit		1	100,000,000		100,000,000		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
						Jumlah Dump Truck				1 Unit	500,000,000			1 Unit	500,000,000	1 Unit		1 Unit			B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
						Jumlah Arm Roll		2 Unit	815,000,000	1 Unit		1 Unit	815,000,000			1 Unit	815,000,000	1 Unit	815,000,000		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
						Jumlah Perahu Sampah				1 Unit	150,000,000										B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Pasimasunggu Kec. Palmasunggu Timur, Kec. TakaboneraKec. Pasimarannu Kec. Pasilambena
						Jumlah Insenerator								1 Unit	1,000,000,000	1 Unit		1 Unit			B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD P.J	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
						Jumlah tangki septik									1 Unit	350,000,000	1 Unit	350,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	
						Jumlah Bangunan Pendukung TPA TPST			1 Unit	200,000,000									B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	
						Pusat Daur Ulang		1 Unit											B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kel. Benteng Utara Kec. Benteng	
						Jumlah Perlengkapan Peralatan TPA TPST									1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	
						Jumlah Alat Pelindung Diri Petugas TPA TPST			110 Buah	50,000,000			100 Buah	45,000,000	100 Buah	45,000,000	110 Buah	45,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	
						Jumlah Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)			1 lokasi	160,000,000	2 Lokasi	250,000,000			1 Lokasi	100,000,000	1 Lokasi	100,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara, Sentra KIPT Hangkoang Sub Sentra Bonehalan g. Desa Mekar Indah	
						Jumlah Tempat Sampah RT Terpilah	694		500 Buah	100,000,000			125 Buah	25,000,000	125 Buah	25,000,000	250 Buah	25,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng	
						JUMLAH			15,198,365,000	15,406,430,617			15,792,053,576	16,170,904,940	16,556,742,734	16,556,742,734					

Tabel 6.3.2
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar
(Berdasarkan KEPMENDAGRI 050-5889)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi									
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.							
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)							
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				92.07	73.00		75.00		80.00		83.00		85.00		90.00										
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan DLH	Nilai SAKIP DLH				54.10	60.32		60.32		60.32		60.32		60.32		60.32										
		Laporan Keuangan DLH sesuai SAP				Sesuai	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		sesuai										
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah				0.66	1.00		1.50		1.76		2.00		2.51		3.00										
			2	11	01			7,823,365,000	100	7,930,466,867	100	8,128,966,453	100	8,323,980,358	100	8,522,590,529	100	8,522,590,529		Sekretariat	DLH						
			2	11	01	2	01																				
			2	11	01	2	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	103,000,000	100	107,000,000	100	122,000,000	100	134,000,000	100	146,000,000	100	146,000,000	Subbagian Program	DLH		
			2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	44,129,600	3	Dokumen	45,000,000	3	Dokumen	48,000,000	3	Dokumen	50,000,000	3	Dokumen	50,000,000	Subbagian Program	DLH
			2	11	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen (RKA)-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	6,000,000	1	Dokumen	7,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Subbagian Program	DLH
			2	11	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen (RKA-P) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	3,000,000	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	5,000,000	Subbagian Program	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen (DPA) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	Subbagian Program	DLH
			2 11 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Subbagian Program	DLH
			2 11 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	12,000,000	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	Subbagian Program	DLH
			2 11 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan	32,870,400	13 Laporan	33,000,000	13 Laporan	35,000,000	13 Laporan	40,000,000	13 Laporan	45,000,000	13 Laporan	45,000,000	Subbagian Program	DLH
			2 11 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	3,337,286,615	100	3,434,202,067	100	3,438,000,000	100	3,445,000,000	100	3,460,000,000	100	3,460,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang telah menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	3,253,657,015	39 Orang/Bulan	3,348,202,067	39 Orang/Bulan	3,350,000,000	39 Orang/Bulan	3,355,000,000	39 Orang/Bulan	3,360,000,000	39 Orang/Bulan	3,360,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	9,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	63,200,000	12 Laporan	64,000,000	12 Laporan	65,000,000	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	70,000,000	12 Laporan	70,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	13,429,600	12 Dokumen	14,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	Subbagian Keuangan	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan BMD yang diselesaikan tepat waktu	100	100	46,000,000	100	48,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	26,000,000	4 Laporan	28,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	35,000,000	4 Laporan	35,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu		85.71	205,500,000	85.71	208,500,000	85.71	215,000,000	85.71	215,000,000	85.71	222,000,000	85.71	222,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen			1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	200,500,000	1 Dokumen	200,500,000	1 Dokumen	201,000,000	1 Dokumen	201,000,000	1 Dokumen	205,000,000	1 Dokumen	205,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
			2 11 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	100	58,400,000	100	71,000,000	100	98,000,000	100	153,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket							1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	22,400,000	4 Dokumen	24,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Subag. Umum, Kegawayaan, & Hukum	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
			2 11 01 2 05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	11,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 05 09	Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		5 Orang	10,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang								2 Orang	20,000,000	2 Orang	20,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	85.71	100	194,124,000	100.00	199,000,000	100	212,000,000	100.00	229,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	8,000,000	50 Buah	9,000,000	50 Buah	10,000,000	50 Buah	12,000,000	50 Buah	15,000,000	50 Buah	15,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	10 Buah	8,000,000	10 Buah	8,000,000	10 Buah	9,000,000	10 Buah	10,000,000	10 Buah	10,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	1 Dokumen	5,000,000	3 Buah	6,000,000	3 Buah	8,000,000	3 Buah	8,000,000	3 Buah	10,000,000	3 Buah	10,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25,000,000	10 Laporan	25,000,000	20 Laporan	26,000,000	20 Laporan	30,000,000	30 Laporan	30,000,000	30 Laporan	30,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136 Laporan	150,124,000	136 Laporan	151,000,000	136 Laporan	160,000,000	136 Laporan	170,000,000	136 Laporan	180,000,000	136 Laporan	180,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah		33.33	102,180,000	33.33	71,000,000	38.46	125,000,000	43.59	185,000,000	43.59	202,000,000	43.59	202,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	3 Unit	65,000,000	4 Unit	95,000,000	4 Unit	120,000,000	4 Unit	120,000,000	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	73,200,000	1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			2 Unit		1 Unit								Subag. Umum, Kep egawaian, &	DLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026					Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)			
			2 11 01 2 07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Paket	12,000,000	10 Paket	13,000,000	10 Paket	15,000,000	10 Paket	16,000,000	10 Paket	20,000,000	10 Paket	20,000,000		20,000,000		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
					Jumlah Kursi Kerja yang diadakan				50 Buah	10,000,000	50 Buah	15,000,000	50 Buah	15,000,000	50 Buah	20,000,000	50 Buah	20,000,000		20,000,000		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	16,980,000	2 Unit	18,000,000	3 Unit	30,000,000	3 Unit	59,000,000	5 Unit	42,000,000				42,000,000		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit											DLH	
			2 11 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			DLH	
			2 11 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			DLH	
			2 11 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,872,284,385	100	2,877,764,800	100	2,883,764,800	100	2,883,764,800	100	2,917,590,529	100	2,917,590,529		2,917,590,529		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	341 Laporan	350 Laporan	25,389,400	350 Laporan	27,000,000	350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000		30,000,000		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	66,442,185	3 Laporan	67,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000		70,000,000		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan			Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2,780,452,800	1 Laporan	2,783,764,800	1 Laporan	2,783,764,800	1 Laporan	2,783,764,800	1 Laporan	2,817,590,529	1 Laporan	2,817,590,529		2,817,590,529		Subag. Umum, Kep egawaian, & Hukum	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		16.31	904,590,000	16.31	914,000,000	16.31	980,201,653	17.73	1,024,215,558	17.73	1,075,000,000	17.73	1,075,000,000	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	47,270,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	57,000,000	2 Unit	58,000,000	2 Unit	65,000,000	2 Unit	65,000,000	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	40 Unit	762,750,000	40 Unit	765,000,000	40 Unit	770,000,000	40 Unit	785,000,000	40 Unit	800,000,000	40 Unit	800,000,000	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	44,000,000	2 Unit	46,000,000	2 Unit	55,000,000	2 Unit	66,215,558	2 Unit	75,000,000	2 Unit	75,000,000	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya								5 Unit		5 Unit		5 Unit	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH	
			2 11 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	20,550,000	10 Unit	21,000,000	10 Unit	63,201,653	10 Unit	75,000,000	10 Unit	85,000,000	10 Unit	85,000,000	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH
			2 11 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit	30,020,000	5 Unit	32,000,000	5 Unit	35,000,000	5 Unit	40,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	Subag. Umum, Kpegawaian, & Hukum	DLH
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup																		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air				IKLH (74,28)	63.46		64.80			66.14		67.48		68.82		68.82		
		Indeks Kualitas Udara				IKA (50,00)	52.00		54.00			56.00		58.00		60.00		60.00		
		Indeks Tutupan Lahan				IKU (88,80)	85.39		85.49			85.59		85.69		85.79		85.79		
						IKTL (89,12)	42.57		45.06			47.56		50.06		52.56		52.56		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
			2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kab	0.00	12.50	350,000,000	12.50	354,791,500	25.00	363,671,931	37.50	372,396,421	37.50	381,281,799	37.50	381,281,799	B. Penataan & Penaatan PPLH		
			2 11 02 2 01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	0.00	12.50	350,000,000	12.50	284,491,580	25.00	291,671,931	37.50	302,396,421	37.50	310,000,000	37.50	310,000,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Benteng	
			2 11 02 2 01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	284,491,580	1 Dokumen	291,671,931	1 Dokumen	247,396,421	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Benteng	
			2 11 02 2 01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota								1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Benteng	
			2 11 02 2 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	16.00			20	70,299,920	28	72,000,000	32	70,000,000	32	71,281,799	32	71,281,799	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar	
			2 11 02 2 02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RTR yang direviu	0	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar
			2 11 02 2 02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar
			2 11 02 2 02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	0	1 Dokumen		1 Dokumen	70,299,920	1 Dokumen	72,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	71,281,799	1 Dokumen	71,281,799	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar	
			2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2.59	2.59	1,980,000,000	2.59	2,007,106,200	2.59	2,057,344,068	2.59	2,106,699,752	2.59	2,156,965,608	2.59	2,156,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 03 2 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	7.14	10	1,435,000,000	10	1,152,106,200	10	1,155,000,000	10	1,196,699,752	10	1,215,965,608	10	1,215,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Bontosikuyu, Kec. Benteng
			2 11 03 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000	16 Dokumen	152,106,200	16 Dokumen	155,000,000	16 Dokumen	160,000,000	16 Dokumen	165,000,000	16 Dokumen	165,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
			2 11 03 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
			2 11 03 2 01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Ko	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang	54 Dokumen	52 Dokumen	375,000,000	50 Dokumen	1,000,000,000	50 Dokumen	1,000,000,000	50 Dokumen	1,036,699,752	50 Dokumen	1,050,965,608	50 Dokumen	1,050,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	DLH
			2 11 03 2 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.00	25	35,000,000	25	200,000,000	25	216,344,068	25	217,000,000	25	220,000,000	25	220,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
			2 11 03 2 02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	216,344,068	2 Laporan	217,000,000	2 Laporan	220,000,000	2 Laporan	220,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
			2 11 03 2 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.002	0.047	510,000,000	0.047	655,000,000	0.047	686,000,000	0.047	693,000,000	0.047	721,000,000	0.047	721,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
			2 11 03 2 03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	0 Dokumen	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	132,000,000	2 Dokumen	145,000,000	2 Dokumen	145,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene
			2 11 03 2 03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	0 Dokumen	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	305,000,000	1 Dokumen	306,000,000	1 Dokumen	306,000,000	1 Dokumen	306,000,000	1 Dokumen	306,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 03 2 03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	10 Dokumen	155,000,000	10 Dokumen	250,000,000	10 Dokumen	250,000,000	10 Dokumen	255,000,000	10 Dokumen	270,000,000	10 Dokumen	270,000,000	B. Pengendalian Pencemaran &	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai,
			2 11 03 2 03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	0 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen			Selayar
			2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1.38	1.38	1,760,000,000	1.38	1,784,094,400	1.38	1,828,750,283	1.38	1,872,622,002	1.38	1,917,302,763	1.38	1,917,302,763	B. Pengendalian Pencemaran &	
			2 11 04 2 01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	2.30	2.31	1,760,000,000	2.31	1,784,094,400	2.31	1,828,750,283	2.31	1,872,622,002	2.31	1,917,302,763	2.31	1,917,302,763	B. Pengendalian Pencemaran &	Selayar
			2 11 04 2 01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Selayar
			2 11 04 2 01 02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	3 Ha	60,000,000	3 Ha	59,594,400	3 Ha	74,750,283	3 Ha	100,000,000	3 Ha	115,000,000	3 Ha	115,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng
			2 11 04 2 01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	5 Ha	500,000,000	5 Ha	497,000,000	5 Ha	500,000,000	5 Ha	377,622,002	5 Ha	382,000,000	5 Ha	382,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan	Dudun Gojang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai
			2 11 04 2 01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1868.98 Ha	20 Ha	1,000,000,000	20 Ha	1,027,500,000	20 Ha	1,029,000,000	20 Ha	1,100,000,000	20 Ha	1,115,000,000	20 Ha	1,115,000,000	B. Pengendalian Pencemaran	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec.
			2 11 04 2 01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,42 Ha	0,42 Ha	100,000,000	0,42 Ha	100,000,000	0,42 Ha	115,000,000	0,42 Ha	175,000,000	0,42 Ha	180,000,000	0,42 Ha	180,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
			2 11 04 2 01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000	5 Unit	110,000,000	5 Unit	120,000,000	5 Unit	125,302,763	5 Unit	125,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan	Kec. Benteng
			2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase lembaga/perusahaan penghasil limbah B3 yang diawasi	100.00	100.00	110,000,000	100.00	111,505,900	100	114,296,893	100.00	117,038,875	100	119,831,423	100	119,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 05 2 01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara		9.25	110,000,000	9.25	111,505,900	9.25	114,296,893	9.25	117,038,875	9.25	119,831,423	9.25	119,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas	Selayar
			2 11 05 2 01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Fasilitas Peretujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	80,000,000	5 Dokumen	61,505,900	5 Dokumen	62,000,000	5 Dokumen	64,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	65,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Benteng
			2 11 05 2 01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Peretujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	52,296,893	5 Laporan	53,038,875	5 Laporan	54,831,423	5 Laporan	54,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Benteng
			2 11 05 2 02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang dikumpulkan	0.00	9.25		9.25		9.25		9.25		9.25		9.25			Selayar
			2 11 05 2 02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Fasilitas Peretujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Selayar
			2 11 05 2 02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai	377 Ton	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Selayar
			2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	63.64	64.00	115,000,000	64.00	116,574,350	66.00	119,492,206	68.00	122,358,824	70.00	125,278,306	70.00	125,278,306	B. Penataan & Penataan PPLH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 06 2 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	6.36	1.33	115,000,000	3.33	116,574,350	16.67	119,492,206	23.33	122,358,824	23.33	125,278,306	23.33	125,278,306	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2 11 06 2 01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	173 Dokumen	1 41 Dokumen	30,000,000	1 41 Dokumen	35,000,000	1 51 Dokumen	36,500,000	1 51 Dokumen	37,000,000	161 Dokumen	38,278,306	161 Dokumen	38,278,306	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2 11 06 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Orang	5 Orang	30,500,000	15 Orang	26,574,350	25 Orang	26,992,206	35 Orang	28,000,000	35 Orang	29,000,000	35 Orang	29,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2 11 06 2 01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Laporan	15 Laporan	20,000,000	15 Laporan	30,000,000	35 Laporan	30,000,000	45 Laporan	30,700,000	45 Laporan	31,000,000	45 Laporan	31,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2 11 06 2 01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	3 Buah	1 Dokumen	34,500,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	26,658,824	1 Dokumen	27,000,000	1 Dokumen	27,000,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	N/A	1.14	30,000,000	2.27	30,410,700	3.41	31,171,880	4.55	31,919,693	5.68	32,681,297	5.68	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 07 2 01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	N/A	11.36	30,000,000	11.36	30,410,700	11.36	31,171,880	11.36	31,919,693	11.36	32,681,297	11.36	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
			2 11 07 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,410,700	1 Dokumen	31,171,880	1 Dokumen	31,919,693	1 Dokumen	32,681,297	1 Dokumen	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
			2 11 07 2 02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang dibina	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			Selayar
			2 11 07 2 02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA berpengetahuan tradisional terkait PPLH yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan pendampingan	0 Buah	1 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah			Selayar
			2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan diklat	N/A	23.08	60,000,000	23.08	60,821,400	23.08	62,343,760	23.08	63,839,386	23.08	65,362,594	23.08	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
			2 11 08 2 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	0.00	100	60,000,000	100	60,821,400	100	62,343,760	100	63,839,386	100	65,362,594	100	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
			2 11 08 2 01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		10 Lembaga		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 08 2 01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,821,400	1 Dokumen	62,343,760	1 Dokumen	63,839,386	1 Dokumen	65,362,594	1 Dokumen	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
			2 11 08 2 01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			Selayar
			2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	20.00	33.33	15,000,000	33.33	15,205,350	33.33	15,585,940	33.33	15,959,847	33.33	16,340,649	33.33	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
			2 11 09 2 01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	22.73	15.00	15,000,000	15.00	15,205,350	15.00	15,585,940	15.00	15,959,847	15.00	16,340,649	15.00	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
			2 11 09 2 01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	20 Entitas	15,000,000	20 Entitas	15,205,350	20 Entitas	15,585,940	20 Entitas	15,959,847	20 Entitas	16,340,649	20 Entitas	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
			2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	80	100.00	35,000,000	100	35,479,150	100	36,367,193	100.00	37,239,642	100	38,128,180	100	38,128,180	B. Penataan & Penataan PPLH	
			2 11 10 2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	80	100	35,000,000	100	35,479,150	100	36,367,193	100	37,239,642	100	38,128,180	100	38,128,180	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2 11 10 2 01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditan		1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,500,000	1 Dokumen	16,239,642	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	16,500,000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 10 2 01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,479,150	1 Dokumen	20,867,193	1 Dokumen	21,000,000	1 Dokumen	21,628,180	1 Dokumen	21,628,180	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar
		IKPS				35.04	35.04		35.08		35.12		35.16		35.20		35.20			
			2 11 11 2 01 01	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1.30	1.30	2,920,000,000	1.30	2,959,974,800	1.30	3,034,062,969	1.30	3,106,850,140	1.30	3,180,979,584	1.30	3,180,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas	
			2 11 11 2 01 01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	14.22	14.23	2,920,000,000	14.23	2,959,974,800	14.27	3,034,062,969	14.35	3,106,850,140	14.46	3,180,979,584	14.46	3,180,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening.	Selayar
			2 11 11 2 01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
			2 11 11 2 01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	397,000,000	1 Laporan	397,000,000	1 Laporan	383,970,000	1 Laporan	383,970,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng Bontoharu
			2 11 11 2 01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5449,95 Ton	6000 Ton	391,030,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	391,030,000	6000 Ton	391,030,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Bontobangun g Kec.
			2 11 11 2 01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	3 kelompok	3 Kelompok	50,000,000	3 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	35,000,000	5 Kelompok	35,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 11 2 01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada		3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	58,000,000	3 Dokumen	58,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
			2 11 11 2 01 06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
			2 11 11 2 01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Ko	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		46 Unit	2,333,970,000	723 Unit	1,968,974,800	78 Unit	2,046,062,969	303 Unit	2,118,850,140	301 Unit	2,262,979,584	433 Unit	2,262,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara
			2 11 11 2 02	Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang mempunyai izin	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09			Selayar
			2 11 11 2 02 01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan terhadap Penerbitan Izin Pengelola Sampah	0 Buah	11 Buah		11 Buah		11 Buah		11 Buah		11 Buah		11 Buah			Selayar
			2 11 11 2 03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang taat	0.00	9.09		18.18		18.18		18.18		18.18		18.18			Selayar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
			2 11 11 2 03 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengelola Sampah yang memenuhi prasyarat penerbitan izin	0 Buah	11 Buah		11 Buah		11 Buah		11 Buah		11 Buah		11 Buah			Selayar
			2 11 11 2 03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	0 Buah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Selayar
			2 11 11 2 03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah	0 Buah	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Selayar
			JUMLAH				15,198,365,000		15,406,430,617		15,792,053,576		16,170,904,940		16,556,742,734		16,556,742,734			

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan					4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	20,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen					13 Dokumen	35,000,000	13 Dokumen	40,000,000	13 Dokumen	45,000,000	13 Dokumen	45,000,000	Subbagian Program	DLH
				2 11 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100					100	3,438,000,000	100	3,445,000,000	100	3,460,000,000	100	3,460,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan					39 Orang/Bulan	3,350,000,000	39 Orang/Bulan	3,355,000,000	39 Orang/Bulan	3,360,000,000	39 Orang/Bulan	3,360,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	9,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															Subbagian Keuangan	DLH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan				12 Laporan	65,000,000	12 Laporan	66,000,000	12 Laporan	70,000,000	12 Laporan	70,000,000	Subbagian Keuangan	DLH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen					12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100					100	55,000,000	100	55,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian & Hukum	DLH
				2 7v 01 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan					4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	35,000,000	4 Laporan	35,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan					4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun						85.71	215,000,000	85.71	215,000,000	85.71	222,000,000	85.71	222,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen					1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen					1 Dokumen	201,000,000	1 Dokumen	201,000,000	1 Dokumen	205,000,000	1 Dokumen	205,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen					12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	12,000,000	12 Laporan	12,000,000	Subbagian Keuangan	DLH
				2 11 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100					100	98,000,000	100	153,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian & Hukum	DLH
				2 11 01 2 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peralatan/Mesin Absensi	1 Buah					1 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah		Subag. Umum, Kepegawaian & Hukum	DLH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket						1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen				4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen				2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 05 0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen				2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 05 0009	Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang				5 Orang	25,000,000	5 Orang	25,000,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang								2 Orang	20,000,000	2 Orang	20,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur LH yang ikut Bimtek	0 Orang				5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang			DLH	
				2 11 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	85.71				100	212,000,000	100.00	229,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket				50 Buah	10,000,000	50 Buah	12,000,000	50 Buah	15,000,000	50 Buah	15,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket					10 Buah	8,000,000	10 Buah	9,000,000	10 Buah	10,000,000	10 Buah	10,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen					3 Buah	8,000,000	3 Buah	8,000,000	3 Buah	10,000,000	3 Buah	10,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					20 Laporan	26,000,000	20 Laporan	30,000,000	30 Laporan	30,000,000	30 Laporan	30,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136 Laporan					136 Laporan	160,000,000	136 Laporan	170,000,000	136 Laporan	180,000,000	136 Laporan	180,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD						38.46	125,000,000	43.59	185,000,000	43.59	202,000,000	43.59	202,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						3 Unit	65,000,000	4Unit	95,000,000	4 Unit	120,000,000	4 Unit	120,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit													Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan						5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						10 Paket	30,000,000	10 Paket	31,000,000	10 Paket	40,000,000	10 Paket	40,000,000	Subag. Umum,Kepegawaian, & Hukum	DLH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi				
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)			
				2 11 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					3 Unit	30,000,000	3 Unit	59,000,000	5 Unit	42,000,000		42,000,000	Subag. Umum,Kepegawain, & Hukum	DLH		
				2 11 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			DLH		
				2 11 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								2 Unit		2 Unit		2 Unit			DLH		
				2 11 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100					100	2,883,764,800	100	2,883,764,800	100	2,917,590,529	100	2,917,590,529	Subag. Umum,Kepegawain & Hukum	DLH		
				2 11 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	341 Laporan					350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000	350 Laporan	30,000,000	Subag. Umum,Kepegawain, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan					3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	3 Laporan	70,000,000	Subag. Umum,Kepegawain, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		Subag. Umum,Kepegawain, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan					1 Laporan	2,783,764,800	1 Laporan	2,783,764,800	1 Laporan	2,817,590,529	1 Laporan	2,817,590,529	1 Laporan	2,817,590,529	Subag. Umum,Kepegawain, & Hukum	DLH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)		
				2 11 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik						16.31	980,201,653	17.73	1,024,215,558	17.73	1,075,000,000	17.73	1,075,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit					2 Unit	57,000,000	2 Unit	58,000,000	2 Unit	65,000,000	2 Unit	65,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit					40 Unit	770,000,000	40 Unit	785,000,000	40 Unit	800,000,000	40 Unit	800,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit					2 Unit	55,000,000	2 Unit	66,215,558	2 Unit	75,000,000	2 Unit	75,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 09 0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya								5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
				2 11 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit					10 Unit	63,201,653	10 Unit	75,000,000	10 Unit	85,000,000	10 Unit	85,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
				2 11 01 2 09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit					5 Unit	35,000,000	5 Unit	40,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi					
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)				
(2)	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup				IKLH (74,28)					66.14		67.48		68.82		68.82						
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air				IKA (50,00)					56.00		58.00		60.00		60.00						
			Indeks Kualitas Udara				IKU (88,80)					85.59		85.69		85.79		85.79						
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan				IKTL (89,12)					47.56		50.06		52.56		52.56						
				2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kab	0.00			25.00	363,671,931	37.50	372,396,421	37.50	381,281,799	37.50	381,281,799	B. Penataan & Penaatan PPLH			
				2	11	02	2	01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase Rekomendasi Rencana PPLH terevaluasi	0.00			25.00	291,671,931	37.50	302,396,421	37.50	310,000,000	37.50	310,000,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Benteng	
				2	11	02	2	01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Benteng		
				2	11	02	2	01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	291,671,931	1 Dokumen	247,396,421	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Benteng
				2	11	02	2	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH yang terlaksana	16.00				28	72,000,000	32	70,000,000	32	71,281,799	32	71,281,799	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)		
				2 11 02 2 02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
				2 11 02 2 02 0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0 Dokumen					1 Dokumen	72,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	71,281,799	1 Dokumen	71,281,799	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
				2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2.59					2.59	2,057,344,068	2.59	2,106,699,752	2.59	2,156,965,608	2.59	2,156,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH		
				2 11 03 2 01	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	7.14					10	1,155,000,000	10	1,196,699,752	10	1,215,965,608	10	1,215,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Bontosikuyu; Kec. Benteng	
				2 11 03 2 01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen					16 Dokumen	155,000,000	16 Dokumen	160,000,000	16 Dokumen	165,000,000	16 Dokumen	165,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar	
				2 11 03 2 01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen					3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
				2 11 03 2 01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	54 Dokumen					50 Dokumen	1,000,000,000	50 Dokumen	1,036,699,752	50 Dokumen	1,050,965,608	50 Dokumen	1,050,965,608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	DLH	
				2 11 03 2 02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.00					25	216,344,068	25	217,000,000	25	220,000,000	25	220,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi	
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 03 2 02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan					2 Laporan	216,344,068	2 Laporan	217,000,000	2 Laporan	220,000,000	2 Laporan	220,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
				2 11 03 2 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0.002					0.047	686,000,000	0.047	693,000,000	0.047	721,000,000	0.047	721,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
				2 11 03 2 03 0006	Pelaksanaan Remediasi	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen					1 Dokumen	306,000,000	1 Dokumen	306,000,000	1 Dokumen	306,000,000	1 Dokumen	306,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomani, Kec. Bontomene, Kec. Bontoharu
				2 11 03 2 03 0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen					10 Dokumen	250,000,000	10 Dokumen	255,000,000	10 Dokumen	270,000,000	10 Dokumen	270,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomani, Kec. Bontomene, Kec. Bontoharu
				2 11 03 2 03 0010	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen					3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen			Selayar
				2 11 03 2 03 0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	M2														

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	0 Dokumen					2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	132,000,000	2 Dokumen	145,000,000	2 Dokumen	145,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomana, Kec. Bontomane, Kec. Bontoharu
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	1.38					1.38	1,828,750,283	1.38	1,872,622,002	1.38	1,917,302,763	1.38	1,917,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
					Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	2.30					2.31	1,828,750,283	2.31	1,872,622,002	2.31	1,917,302,763	2.31	1,917,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Selayar
					Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola LingkupKewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha					5 Ha	500,000,000	5 Ha	377,622,002	5 Ha	382,000,000	5 Ha	382,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Dudun Gojang Desa Bontomarranu Kec. Bontomana
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1868,98 Ha					20 Ha	1,029,000,000	20 Ha	1,100,000,000	20 Ha	1,115,000,000	20 Ha	1,115,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomana, Kec. Bontomane, Kec. Bontoharu
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Orang					10 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah		B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit					5 Unit	110,000,000	5 Unit	120,000,000	5 Unit	125,302,763	5 Unit	125,302,763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 04 2 01 0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,42 Ha					0,42 Ha	115,000,000	0,42 Ha	175,000,000	0,42 Ha	180,000,000	0,42 Ha	180,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
				2 11 04 2 01 0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha					3 Ha	74,750,283	3 Ha	100,000,000	3 Ha	115,000,000	3 Ha	115,000,000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng
				2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase lembaga/perusahaan penghasil limbah B3 yang diawasi	100.00					100	114,296,893	100.00	117,038,875	100	119,831,423	100	119,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
				2 11 05 2 01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang disimpan sementara						9.25	114,296,893	9.25	117,038,875	9.25	119,831,423	9.25	119,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 05 2 01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen					5 Dokumen	62,000,000	5 Dokumen	64,000,000	5 Dokumen	65,000,000	5 Dokumen	65,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Benteng
				2 11 05 2 01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5 Laporan					5 Laporan	52,296,893	5 Laporan	53,038,875	5 Laporan	54,831,423	5 Laporan	54,831,423	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kec. Benteng
				2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	63.64					66.00	119,492,206	68.00	122,358,824	70.00	125,278,306	70.00	125,278,306	B. Penataan & Penataan PPLH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 06 2 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pejabat Pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	6.36					16.67	119,492,206	23.33	122,358,824	23.33	125,278,306	23.33	125,278,306	B. Penataan & Pnaataan PPLH	Selayar
				2 11 06 2 01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	173 Dokumen					1 51 Dokumen	36,500,000	1 51 Dokumen	37,000,000	161 Dokumen	38,278,306	161 Dokumen	38,278,306	B. Penataan & Pnaataan PPLH	Selayar
				2 11 06 2 01 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	11 Laporan					35 Laporan	30,000,000	45 Laporan	30,700,000	45 Laporan	31,000,000	45 Laporan	31,000,000	B. Penataan & Pnaataan PPLH	Selayar
				2 11 06 2 01 0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang														
				2 11 06 2 01 0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang					25 Orang	52,992,206	35 Orang	54,658,824	35 Orang	56,000,000	35 Orang	56,000,000	B. Penataan & Pnaataan PPLH	Selayar
				2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKA THUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	N/A					3.41	31,171,880	4.55	31,919,693	5.68	32,681,297	5.68	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 07 2 01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional terkait PPLH yang diakui	N/A					11.36	31,171,880	11.36	31,919,693	11.36	32,681,297	11.36	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 07 2 01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					1 Dokumen	31,171,880	1 Dokumen	31,919,693	1 Dokumen	32,681,297	1 Dokumen	32,681,297	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
				2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat	N/A					23.08	62,343,760	23.08	63,839,386	23.08	65,362,594	23.08	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
				2 11 08 2 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan	0.00					100	62,343,760	100	63,839,386	100	65,362,594	100	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 08 2 01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						1 Dokumen	62,343,760	1 Dokumen	63,839,386	1 Dokumen	65,362,594	1 Dokumen	65,362,594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	20.00					33.33	15,585,940	33.33	15,959,847	33.33	16,340,649	33.33	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
				2 11 09 2 01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	22.73					15.00	15,585,940	15.00	15,959,847	15.00	16,340,649	15.00	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
				2 11 09 2 01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas					20 Entitas	15,585,940	20 Entitas	15,959,847	20 Entitas	16,340,649	20 Entitas	16,340,649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	80					100	36,367,193	100.00	37,239,642	100	38,128,180	100	38,128,180	B. Penataan & Penaatan PPLH	
				2 11 10 2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan/Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	80					100	36,367,193	100	37,239,642	100	38,128,180	100	38,128,180	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar
				2 11 10 2 01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani						1 Dokumen	15,500,000	1 Dokumen	16,239,642	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	16,500,000	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar
				2 11 10 2 01 0006	Penerapan sanksi administratif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota						1 Dokumen	20,867,193	1 Dokumen	21,000,000	1 Dokumen	21,628,180	1 Dokumen	21,628,180	B. Penataan & Penaatan PPLH	Selayar
							35.04					35.12		35.16		35.20		35.20			
				2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1.30					1.30	3,034,062,969	1.30	3,106,850,140	1.30	3,180,979,584	1.30	3,180,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	
				2 11 11 2 01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	14.22					14.27	3,034,062,969	14.35	3,106,850,140	14.46	3,180,979,584	14.46	3,180,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
				2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok					5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	35,000,000	5 Kelompok	35,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Desa Bongaya, Desa Parak
				2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada						3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	85,000,000	3 Dokumen	58,000,000	3 Dokumen	58,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
				2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir						78 Unit	2,046,062,969	303 Unit	2,118,850,140	301 Unit	2,262,979,584	433 Unit	2,262,979,584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara
				2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan						1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD PJ	Lokasi		
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)
				2 11 11 2 01 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						1 Laporan	397,000,000	1 Laporan	397,000,000	1 Laporan	383,970,000	1 Laporan	383,970,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng Bontoharu
				2 11 11 2 01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5449,95 Ton					6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	396,000,000	6000 Ton	391,030,000	6000 Ton	391,030,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Bontobangunan Kec. Bontoharu, Desa Bontobangunan Kec. Bontoharu
				2 11 11 2 01 0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan		3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
				2 11 11 2 02	Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pengelola Sampah Swasta yang mempunyai izin	0.00					9.09		9.09			9.09		9.09		Selayar
				2 11 11 2 02 0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	0 Buah					11 Buah		11 Buah			11 Buah		11 Buah		Selayar

Tabel 6.3.

**DUKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PROGRAM STRATEGIS
DAN PROGRAM PRIORITAS**

NO	Program	Tahapan	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan				Anggaran	
				2023	2024	2025	2026		
1	Program Pembangunan Pusat Distribusi	Pembentukan	Perda Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	√				Rp 100,000,000	
		Pembangunan	Pembangunan RTH Sepanjang Jalan Menuju Kawasan PDL			√			Rp 200,000,000
			Pembangunan RTH Pelabuhan, Penumpukan dan Barang	√					
			Pembangunan RTH Terminal Penumpang	√					Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Pelataran Barang						Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Pergudangan	√					Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Fasilitas Umum dan Perkantoran						Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Pelabuhan Peti Kemas	√					Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Terminal Peti Kemas						Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Pelataran Peti Kemas						Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Pergudangan (Zona 2)	√					Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Industri Pertanian						Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Industri Manufaktur	√					Rp 500,000,000
			Pembangunan RTH Fasilitas Umum dan Perkantoran Zona Industri	√					Rp 500,000,000
2	pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)	Pembangunan	Tempat Pembangunan Sementara Sentra KIPT Hangkoang		√			Rp 100,000,000	
			Peningkatan Tempat Pembuangan Sementara Sub Sentra Bonehalang					Rp 150,000,000	
3	Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)		Pembangunan TPS dan TPA Sampah di Desa Mekar Indah		√			-	

Tabel 6.3.3.											
PROGRAM DAN KEGIATAN INVESTASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR											
No.	Program/Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan				Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan	
			2022	2023	2024	2025					2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
1.1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	2 Unit	√					Kec. Bontosikuyu; Kec. Benteng.	2,500,000,000	DAK	Kelengkapan Dokumen TOR DAK 2022 Pengadaan EARLY WARNING SYTEM Pengendalian Bencana LH; Laporan Kemajuan DAK Tahun 2019 Sub Bidang/Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium LH; Data IKLH Tahun 2020; Data SDM Laboratorium; Baseline Data Alat Laboratorium; Data usulan sarpras yang akan diadakan; Data Usulan Sarpras Untuk Onlino; Surat Keterangan Peminjaman Lahan; Surat Pernyataan kesediaan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Selayar dalam memberikan dukungan
1.1.1.	Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis di DAS yang mendukung Food Estate (Bangunan dan Alat)	1 Unit	√					Desa Harapan Kec. Bontosikuyu	1,300,000,000	DAK	
1.1.2.	Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Air dan Merkuri	1 Unit	√					Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng	1,200,000,000	DAK	
2. Program Pengelolaan Persampahan											
2.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		√					Kec. Benteng; Kec. Bontoharu; Kec. Bontomanai; Bontomatene ;Kec. Bontosikuyu;	8,836,000,000	DAK	Kelengkapan Dokumen TOR DAK 2020 - Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung.; Data Timbulan Sampah & Baseline Sarpras Pengelolaan Sampah; Data Usulan Sarpras Tahun 2022; DED Bank Sampah Induk; DED Pusat Daur Ulang; DED Rumah Kompos; Gambar & Kelengkapan Rumah Kompos; Sertifikat Tanah Desa Barugaiya Kec. Bontomanai, Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu, Kel. Benteng Utara Kec. Benteng; Surat Permohonan Pembangunan Sarana BSI, Rumah Kompos; Surat
2.1.1.	Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	1	√					Kel. Benteng Utara Kec. Benteng	2,300,000,000	DAK	
2.1.2.	Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI)	1	√					Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu	1,200,000,000	DAK	
2.1.3.	Pembangunan Rumah Kompos	1	√					Desa Barugaiya Kec. Bontomanai	1,000,000,000	DAK	
2.1.4.	Penyediaan Alat Angkut Sampah <i>Arm Roll Truck</i>	2	√					Kawasan Pariwisata Pantai Pa'badilang Desa Bongaiya Kec. Bontomatene	1,700,000,000	DAK	
		1	√					Kawasan Pariwisata Pantai Baloiya Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	850,000,000	DAK	
		1	√					Kawasan Pariwisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	850,000,000	DAK	
2.1.5.	Penyediaan Kontainer Sampah	5	√					Kawasan Pariwisata Pantai Pa'badilang Desa Bongaiya Kec. Bontomatene	275,000,000	DAK	
		3	√					Kawasan Pariwisata Pantai Baloiya Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	165,000,000	DAK	

		3	√							Kawasan Pariwisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	165,000,000	DAK	
2.1.6	Penyediaan Mesin Press Hidrolik	1	√							Kelurahan Benteng Utara Kec. Benteng	88,000,000	DAK	
		1	√							Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu	88,000,000	DAK	
2.1.7	Penyediaan Mesin Pencacah Organik	1	√							Desa Barugaiya Kec. Bontomanai	29,000,000	DAK	
2.1.8	Peningkatan dan optimalisasi TPA	1 Paket		√						Desa Kaburu Kecamatan	10,000,000,000	APBD Provinsi	
2.1.9	Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Sampah Roda Tiga & Gerobak Pilah)	1	√							Kawasan Pariwisata Pantai Pa'badilang Desa Bongaiya Kec. Bontomatene	42,000,000	DAK	
		1	√							Kawasan Pariwisata Pantai Baloiya Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	42,000,000	DAK	
		1	√							Kawasan Pariwisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	42,000,000	DAK	
2.1.10	Peningkatan dan optimalisasi TPA	1 Paket		√						Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	10,000,000,000	APBN	
2.1.11	Pembangunan pagar TPA	1 Paket	√							Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	250,000,000	APBD Provinsi	
2.1.12	Pengadaan Alat Berat (Doser)	1 Unit	√							Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	300,000,000	APBD Provinsi	
2.1.13	Pengadaan Alat Berat Eskavator	1 Unit	√							Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	184,000,000	APBD Provinsi	
2.1.14	Pengadaan Mesin Pencacah Plastik	2 Buah	√	√	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	135,750,000	DAK	
2.1.15	Pengadaan Mesin Pres	2 Buah	√	√	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	65,000,000	DAK	
2.1.16	Pengadaan Truk Arm Roll	5 Buah	√		√				√	Kab. Kepulauan Selayar	700,000,000	DAK	
2.1.17	Pengadaan Dumtruck	5 Buah	√		√				√	Kab. Kepulauan Selayar	600,000,000	DAK	
2.1.18	Pengadaan Motor Sampah	10 Buah	√		√				√	Kab. Kepulauan Selayar	45,000,000	DAK	
2.1.19	Pengadaan Mesin Pengayak	5 Buah	√	√	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	15,000,000	DAK	
2.1.20	Mesin Pencacah Organik	5 Buah	√	√	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	21,000,000	DAK	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan strategis.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya.

Oleh karena itu, indikator kinerja SKPD pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai komitmen untuk pendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMN dan RPJMD, dapat diuraikan sebagaimana tabel 7.1. dan Sustainable Development Goals (SDGS) sebagaimana tabel 7.2

Tabel 7.1.
INDIKATOR KINERJA DLH
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kab	0,00	12,50	25,00	37,50	37,50	37,50	37,51
2.	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
3.	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
4.	Persentase Lembaga/Perusahaan penghasil Limbah B3 yang diawasi	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	63,64	64,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
6.	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	0,00	1,14	2,27	3,41	4,55	5,68	5,68
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat	0,00	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
8.	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	20,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
9.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Tabel 7.2.								
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs								
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026								
Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline	Target Pada Tahun Ke				
			2020	2022	2023	2024	2025	2026
Pilar Pembangunan Lingkungan								
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak								
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	50	52	54	56	58	60
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Das	2	2	2	2	2	2
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur								
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	%	89,1	89,3	89,5	89,6	89,8	90,0
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun		650	675	700	725	750
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim								
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	N/A	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tujuan 15. Ekosistem Daratan								
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							

15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Ha	N/A	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	100
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.							
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	100

*Catatan: Penyelesaian tindak pidana LH tidak sampai dengan P21

Selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, maka terdapat 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 88,80 poin menjadi 88,85 poin (2026); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 50,00 poin menjadi 55,50 poin (2026); (3) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 89,12 poin menjadi 89,12 poin (2026)
- b. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten dari 0% menjadi 12,50% (2026); (2) persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dari 63,64% menjadi 70%(2026); (3) persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan dari 80% menjadi 100% (2026).
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pengujian kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu dari 7,14% menjadi 10,00% (2026); (2) persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari 0% menjadi 25,00% (2026); (3) persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari 0,002% menjadi 0,047% (2026); (4) persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dari 1,38% menjadi 1,38% (2026).
- d. Pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan indikator yaitu: (1) persentase pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dari 14,22% menjadi 14,46% (2026); (2) persentase limbah B3 yang dikendalikan dari 9,25% menjadi 9,25% (2026); (3) persentase MHA, kearifan lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya dari 0% menjadi 5,68% (2026); (4) persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat dari 0% menjadi 23,08% (2026); (5) persentase lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang berprestasi dari 20,00% menjadi 33,33% (2026).

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 serta merupakan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 01 Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T.,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP: 19720303 200604 1 020

LAMPIRAN